OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN (STUDI PADA PESANTREN MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA)

Optimizing Productive Wakaf For The Economic Independence Of Islamic Boarding School (A Study At The Muhammadiyah Boarding School In Yogyakarta)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

Siti Achiria
acc munaqasah
7 Oktober 2025

Oleh:

Hani'ah Mahmudah

(21423155)

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hani'ah Mahmudah
NIM	: 21423155
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan

Yogyakarta, 15 September 2025



Hani'ah Mahmudah

ii

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Oktober 2025 2025 M
12 Rabi'ul Akhir 1447 H

Hal : Tugas Akhir Penelitian
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 575/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025M, 5 Muharram 1447 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Hani'ah Mahmudah

Nomor Mahasiswa : 21423155

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing

Siti Achiria, S.E., M.M

iii

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi

Nama : Hani'ah Mahmudah

NIM : 21423155

Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 4 Oktober 2025

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

iv

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	28 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir	:	Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi pada Pesantren Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta)
Nama	:	HANI'AH MAHMUDAH
Nomor Mahasiswa	:	21423155

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)

Penguji 1
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Penguji 2
Sofwan Hadikusuma, Lc, ME (.....)

Yogyakarta, 28 Oktober 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam

Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat Allah Swt, baik nikmat sehat, hidayah, dan terutama nikmat iman serta Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada idola dan kekasih kami, Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Karya sederhana namun penuh makna ini saya susun dan persembahkan dengan sebaik-baiknya kepada:

Kedua orang tuaku, yang telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk terus menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Materi, doa, serta dukungan selalu mereka berikan demi kelancaran studiku. Semoga Allah Swt membalas dengan sebaik-baiknya balasan, menganugerahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan rezeki yang tiada hentinya.

Seluruh dosen Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu berharga dalam pengajaran yang luar biasa. Terutama kepada dosen peminatan Keuangan Publik Islam, dengan praktikumnya yang hebat membuat kami banyak belajar untuk senantiasa mengabdi kepada umat Islam dalam berbagai bidang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan hidup, dan keistiqamahan dalam mengajar dimanapun dan kapanpun.

Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Ekonomi Islam, santri-mahasiswi Pesantren Pandanaran Komplek 6, teman-teman K2, khususnya sahabatku KB Cendekia, serta Unicorn. Semoga silaturahmi ini senantiasa terjaga hingga tua nanti. Terima kasih telah membersamai, memberi motivasi, serta dukungan. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian semua.

MOTTO

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.
(Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

"Kekuatan umat terletak pada kemakmuran ekonominya, dan kemakmuran ekonomi tidak akan tegak tanpa adanya keadilan dan pengelolaan yang baik."

(Ibnu Khaldun)

ABSTRAK

OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN (STUDI PADA PESANTREN MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA)

HANI'AH MAHMUDAH

21423155

Wakaf merupakan ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang bertujuan untuk pengabdian kepada Allah SWT sekaligus menjadi salah satu instrumen keuangan publik Islam dengan potensi besar dalam sistem ekonomi Islam. Data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama RI tahun 2024 mencatat luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.763 hektar di 440.512 lokasi, sebagian besar dimanfaatkan untuk ibadah dan pendidikan. Namun, banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal dan masih terbatas pada kegiatan keagamaan, padahal strategi kunci optimalisasi adalah menjadikannya produktif. Pesantren menjadi salah satu lembaga yang memanfaatkan aset wakaf, dengan 4,10% lahan wakaf nasional digunakan oleh pesantren. Data ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan pada aspek pendidikan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan wakaf produktif guna menunjang lembaganya. Oleh karena itu kemandirian ekonomi pesantren menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional dan otonomi. Salah satu pesantren besar di DIY yang memanfaatkan asset wakaf produktif adalah Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, yang berdiri tahun 2008. MBS memiliki aset wakaf dalam jumlah besar, khususnya lahan, yang mendorong pengembangan unit usaha produktif. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan aset wakaf di pesantren serta peran nazhir dalam mendukung kemandirian ekonomi dengan standar evaluasi Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan wakaf di MBS telah memenuhi sebagian besar aspek IWN, meliputi regulasi, proses, sistem, hasil, dan dampak, namun masih perlu penguatan pada faktor kelembagaan, khususnya integrasi nazhir dan pengelola usaha produktif serta media informasi publik. Pemanfaatan wakaf produktif terbukti berkontribusi nyata pada kemandirian ekonomi pesantren, meskipun belum sepenuhnya mandiri, perkembangan ini menunjukkan potensi besar menuju kemandirian penuh di masa mendatang.

Kata Kunci: Wakaf, Kemandirian Ekonomi, Pesantren

ABSTRACT

OPTIMIZING PRODUCTIVE WAKAF FOR THE ECONOMIC INDEPENDENCE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL (A STUDY AT THE MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL IN YOGYAKARTA)

HANI'AH MAHMUDAH

21423155

Waqf is a form of social worship (ijtimaiyah) that aims to serve Allah SWT while also serving as an Islamic public financial instrument with great potential in the Islamic economic system. Data from the Indonesian Ministry of Religious Affairs' Waqf Information System (Siwak) in 2024 shows that the total area of waqf land in Indonesia reaches 57,763 hectares in 440,512 locations, most of which are used for worship and education. However, many waqf assets are not yet optimally managed and are still limited to religious activities, even though the key strategy for optimization is to make them productive. Islamic boarding schools are one of the institutions that utilize waqf assets, with 4.10% of national waqf land used by Islamic boarding schools. This data shows that Islamic boarding schools not only play a role in education, but also have great potential in developing productive waqf to support their institutions. Therefore, the economic independence of Islamic boarding schools is a crucial factor in maintaining operational sustainability and autonomy. One of the large Islamic boarding schools in the Special Region of Yogyakarta that utilizes productive waqf assets is the Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, which was established in 2008. MBS has a large amount of waqf assets, particularly land, which encourages the development of productive business units. This study aims to examine the management of waqf assets in Islamic boarding schools and the role of nazhir in supporting economic independence using the 2022 National Waqf Index (IWN) evaluation standards of the Indonesian Waqf Board. The results show that waqf management at MBS has met most aspects of the IWN, including regulations, processes, systems, results, and impact, but still needs strengthening in institutional factors, particularly the integration of nazhir and productive business managers as well as public information media. The utilization of productive waqf has proven to contribute significantly to the economic independence of Islamic boarding schools. Although they are not yet fully independent, this development shows great potential for full independence in the future.

***Keywords**: Waqf, Economic Independence, Islamic Boarding School*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ta	T	Te
ت	Ba	B	Be
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	’ ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Ka	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ...	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ىَ...	fathah dan alif atau ya	A	A
ى...	kasrah dan ya	I	I
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-munawwarah
	- al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةْ	- talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-Rabbana	الحَجّ	- al-hajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعِمَ	-nu'ima
البِرُّ	-al-birr		

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata xv sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
اَلسَّيِّدُ	- as-sayyidu	اَلْبَدِيعُ	- al-badĭ'u

الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khużūna	إِنَّ	-inna
النَّوْء	-an-nau'u	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيِئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya katakata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur bagi Allah SST yang telah memberikan anugerah luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir penelitian dengan judul **"Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pesantren MBS Yogyakarta)**. Solawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tentu penulis mengalami rintangan dan kesulitan, namun atas arahan, bantuan, bimbingan berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Anom Garbo, SEI., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, membersamai dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan pengajaran selama masa studi. Semoga bapak ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dengan sebai-baiknya balasan. Tak lupa seluruh staf prodi

dan akademik yang telah memberikan pelayanan dan pengarahan yang sangat baik.

7. Bapak Nuyyamin, Ibu Nur Khayati, selaku orang tua penulis. Saudara kandung penulis Naja Bisyri, Mahyana Ulya, Khotimatu khususnya adik penulis Nur Azizah yang selalu mendukung studi penulis dengan memberikan doa dan motivasi.
8. Ibu Nyai Hj. Muflihah Mufid, Bapak KH. Hasan Karyono, selaku pengasuh Asrama Mahasiswi Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, Terima kasih atas Doa dan dukungan positif kepada penulis. Semoga Allah panjangkan usia beliau, diberikan keberkahan dalam hidup beliau.
9. Mahasantri Pandan Aran Komplek 6, khususnya Asrama Khodijah Lt1 yang membersamai penulis dari semester awal hingga tamat.
10. Santri Pondok Pesantren Nurul Jannah, terima kasih atas kesediaanya membersamai penulis untuk terus berkembang, belajar makna kehidupan.
11. Asisten dosen pribadi penulis, Bude Ifta Farhiyyatan Nadya terima kasih untuk waktunya menerima diskusi penulis kapanpun dan dalam kondisi apapun.
12. Kyai Nasir selaku Pimpinan MBS Yogyakarta dan seluruh Ustadz-Ustadzahnya, khususnya Ustadadzh Dian. Terima kasih atas kesediaanya penulis melaksanakan penelitian di lembaganya. Terima kasih untuk segala waktu yang dicurahkan.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2021, khususnya peminatan K2. Terima kasih telah bersama menjalani semester demi semester dengan solid.
14. Sahabatku, Nyai Isna, Weng Putri. Rumah Keduaku Cindikia Mbak Lia Uzma, Mbak Qibti, Mia, Zahra, Mia, Aya, Haya. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, suka duka telah terlewati, sehat bahagia semuanya.
15. Roommateku Inats yang telah menemani penulis dengan taqdir yang mirip, sehat selalu untuk terus berkhidmah. Terima kasih untuk diskusi dagingnya yang tak pernah henti.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis mengharap kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan keilmuan dibidang ekonomi islam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 September 2025



Hani'ah Mahmudah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
NOTA DINAS iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
HALAMAN PENGESAHAN v
LEMBAR PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN x
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxiv
DAFTAR GAMBAR xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat 9
E. Sistematika Penulisan 10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 12
A. Telaah Pustaka 12
B. Kerangka Teori 18
1. Wakaf 18
3. Optimalisasi 22
2. Pesantren 27
3. Kemandirian Ekonomi 28
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Desain Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian 31
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 32
D. Objek Penelitian 32
E. Sumber Data 32
F. Teknik Pengumpulan Data 33
G. Instrumen Penelitian 35
H. Teknik Analisis Data 35
I. Keabsahan data 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta 38
1. Sejarah Singkat 38
2. Profil Lembaga 39
3. Struktur Organisasi 39
4. Visi – Misi Pesantren 40
5. Aset Wakaf Yang Dimiliki 41
6. Usaha Produktif Berbasis Wakaf 42
B. Implementasi Pesantren dalam Optimalisasi Aset Wakaf 46
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 1
RIWAYAT HIDUP 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pesantren di DIY 6

Tabel 1. 2 Data Pesantren di Wilayah Kabupaten Sleman..... 6

Tabel 4. 1 Matriks Kesimpulan Optimalisasi Wakaf Berdasarkan Indikator Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 65

DAFTAR GAMBAR

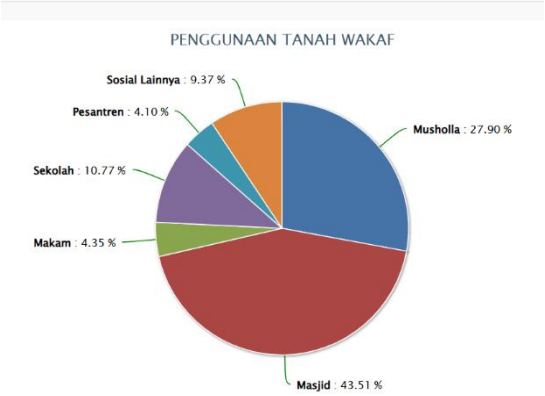
Gambar 1. 1 Diagram penggunaan tanah wakaf di Indonesia 1
Gambar 4. 1 Hasbuna Mart 42
Gambar 4. 2 Hasbuna Resto 43
Gambar 4. 3 Hasbuna Catering 43
Gambar 4. 4 Hasbuna Bakery 44
Gambar 4. 5 Hasbuna Laundry 45
Gambar 4. 6 WaNi (Warung Rabbani) 45
Gambar 4. 7 Sawah Pertanian 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang tujuan utama untuk pengabdian kepada Allah SWT sekaligus sebagai salah satu instrumen keuangan publik islam dalam sistem ekonomi islam yang memiliki potensi besar. Wakaf menjadi hal yang istimewa karena kemampuannya untuk menciptakan keberlanjutan manfaat *(sustainability)* bagi masyarakat luas tanpa mengurangi aset pokoknya. Dalam praktiknya, harta wakaf diserahkan untuk kepentingan umum dan dikelola oleh nazhir, yakni pihak yang bertugas menjaga dan mengembangkan, kemudian nazhir mengelola aset wakaf sesuai dengan akad wakif. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (*Siwak*) Kementerian Agama RI tahun 2024, tercatat luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.763 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi.



Sumber: Siwak Kemenag 2024

Gambar 1. 1 Diagram penggunaan tanah wakaf di Indonesia

Diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan, seperti masjid (43,51%), musala (27,90%) dan sarana pendidikan (14, 87%). Kenyataan menunjukkan banyak aset wakaf baik tanah maupun uang yang belum dikelola secara optimal, bahkan sebagian diantaranya dibiarkan terbengkalai dan tidak produktif (Bayu Sudrajat & Ainul Imronah, 2023). Kondisi ini menjadi ironi mengingat wakaf memiliki karakteristik unik, yaitu menjaga

keutuhan nilai pokok dan mengambil manfaat dari hasil pengembangannya. Hal ini menjadikan wakaf sumber daya yang strategis untuk penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dengan penerapan manajemen yang profesional dan tata kelola yang baik (*good governance*), aset wakaf dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah dan solusi alternatif dalam pembangunan berkelanjutan (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan aset wakaf hingga kini masih belum optimal. Oleh karena itu, tantangan besar bagi ekonomi islam saat ini adalah bagaimana mengembangkan dan mengaktifkan aset wakaf agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Menyikapi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk menggerakkan aset wakaf secara masif dan terstruktur dengan langkah-langkah konkret seperti peningkatan literasi wakaf di masyarakat, penguatan kapasitas nazhir, membangun kemitraan dalam proyek-proyek berbasis wakaf serta pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan efektivitas pengelolaan.

Salah satu strategi kunci dalam optimalisasi pengelolaan wakaf adalah menjadikan aset wakaf bersifat produktif. Wakaf produktif adalah pemanfaatan aset wakaf yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dalam konteks ekonomi, wakaf produktif merupakan kemampuan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Abrori et al., 2022). Sejumlah masjid dan lembaga islam lainnya telah menerima wakaf dari wakif seperti tanah, rumah dan kendaraan. Namun ironinya, pemanfaatannya masih terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan fasilitas ibadah dan makam tanpa diikuti upaya produktif lainnya yang berkelanjutan. Padahal kegiatan keibadahan tersebut seringkali memerlukan biaya penunjang operasional yang tidak sedikit, sementara sumber pemasukan tetap untuk membiayai kegiatan tersebut belum tersedia. Akibatnya, terjadi ketergantungan pada donasi insidental dan dana sosial lainnya.

Aset wakaf milik umat masih sedikit yang diorientasikan untuk peningkatan ekonomi. Jika menarik sejarah masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, wakaf masjid tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, tetapi masjid juga diimbangi dengan pemanfaatan lahan produktif seperti lahan berupa perkebunan, ladang dan sumur. Seperti sumur raumah wakaf milik Usman bin Affan Ra yang dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat Madinah. Begitu pula perkebunan yang dikelola dan hasil panennya disalurkan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini menunjukkan bahwa wakaf pada masa awal islam telah memiliki dimensi ekonomi yang kuat dan dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Maka dari itu, pengelolaan aset wakaf oleh nazhir diarahkan kepada pemberdayaan umat bukan hanya semata-mata simbol ibadah.

Disisi lain, nazhir sebagai pengelola wakaf masih menghadapi tantangan besar dalam memaksimalkan potensi aset yang dimiliki, seperti minimnya pengetahuan, keterampilan manajerial serta kemampuan menjalankan perannya secara optimal. Sehingga banyak aset wakaf yang pada akhirnya tidak produktif bahkan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nazhir diharapkan tidak hanya mampu menjaga nilai pokok, tetapi juga inovasinya dalam mengelola aset wakaf sehingga memberdayakan dan bersifat ekonomis.

Salah satu lembaga pendidikan yang memanfaatkan aset wakaf adalah pesantren. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf *(Siwak)* tahun 2024, 4,10% lahan wakaf di Indonesia dimanfaatkan oleh pesantren. Pesantren sendiri telah menjadi pusat pendidikan sejak awal masuknya islam di Nusantara. Saat ini pesantren telah berkembang pesat di Indonesia. Menurut data *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama tahun 2024, tercatat sebanyak 350.217 pesantren tersebar di seluruh Indonesia dengan total santri mencapai lebih dari 9 juta. Angka ini menunjukkan potensi besar bagi perkembangan pesantren dalam membangun peradaban umat termasuk bidang ekonomi berbasis wakaf.

Pesantren dengan segala aktivitasnya melibatkan banyak pihak seperti guru pengajar, pembimbing asrama, keamanan dan lainnya. Tentu hal ini memerlukan sumber dana yang memadai untuk mencukupi kebutuhan operasional. Jika hanya mengandalkan iuran dari wali santri, kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan tambahan guna memenuhi kebutuhan pesantren secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengelola pesantren untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas layanan dakwah serta menjaga kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga pengajar dan staf pesantren (Faozan & Supratno, 2022). Kondisi ini memerlukan sumber pendanaan yang stabil agar pesantren dapat berkembang secara optimal. Sejumlah pesantren berupaya mencari tambahan dana melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti penggalangan donasi dari masyarakat, menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan mengelola Usaha Produktif sederhana. Langkah ini patut diapresiasi, namun ketergantungan yang tinggi pada bantuan pihak lain terutama donatur menjadikan pesantren tidak mandiri dan berresiko membuka celah intervensi dalam pengambilan keputusan internal pesantren. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah lain yang memungkinkan pesantren memiliki sumber pendanaan tetap dan dikelola secara mandiri.

Bergantungnya pesantren pada sumber pendanaan eksternal, menjadikan kemandirian ekonomi sebagai faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan dan otonomi pesantren. Dengan kondisi ekonomi yang mandiri, sebuah pesantren tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan operasional internal secara berkesinambungan, tetapi juga dapat memperluas cangkupan dakwah dan kegiatan sosial lainnya secara independen. Untuk mewujudkan hal ini, pesantren perlu menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin, baik berupa potensi sumber daya manusia maupun aset fisik. Namun demikian, salah satu potensi besar yang sering terabaikan adalah aset wakaf milik pesantren. Sayangnya aset wakaf ini belum maksimal dalam penggunaanya untuk mendukung kemandirian

ekonomi pesantren. Optimalisasi aset wakaf menjadi salah satu solusi strategis untuk menciptakan kemandirian finansial pesantren.

Pada konteks wakaf produktif milik pesantren, keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi nazhir atau pengurus wakaf. Nazhir menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan aset wakaf agar tetap bernilai guna dan memiliki dampak nyata terhadap operasional pesantren. Kecakapan nazhir dalam memanajemen aset, perencanaan usaha, hingga kemampuan membaca peluang ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan aset wakaf menuju tujuan besar yaitu, kemandirian finansial ekonomi dan kesejahteraan pesantren. Oleh karena itu, keputusan nazhir sangat diharapkan mampu membawa pesantren ke arah yang lebih berdaya.

Ketika pesantren mampu mengelola dan memproduktifkan aset wakafnya, secara bertahap mampu membantu mencukupi kebutuhan operasionalnya bahkan mensejahterakan. Pemanfaatan aset wakaf sebaiknya didorong ke sektor usaha produktif agar memiliki manfaat yang lebih besar (Ni'mati Rahmatika et al., 2021). Untuk memaksimalkan potensi ini, pesantren dapat menjalin kerjasama dengan pihak pihak eksternal yang terpercaya, kompeten dibidangnya dan memiliki kapabilitas, seperti lembaga keuangan syariah, institusi bisnis berbasis islam ataupun inkubator kewirausahaan. Melalui kerjasama ini, pesantren tidak hanya mendapatkan pendampingan teknis tetapi juga dapat mengakses jaringan pasar dan pembiayaan yang lebih luas. Jika pengelolaan wakaf dilakukan dengan tepat, maka akan terjadi suatu kemandirian ekonomi pesantren dan kesejahteraan masyarakat sekitar akan mengalami peningkatan (Wijaya & Sukmana, 2020). Dengan demikian optimalisasi aset wakaf bukan hanya soal keberlangsungan pesantren tetapi juga bagian dari kontribusi nyata pesantren dalam membangun umat yang inklusif dan berkeadilan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pesantren juga memiliki kontribusi signifikan dalam sistem pendidikan. Data EMIS Kementerian Agama DIY tahun 2024 mencatat terdapat 438 pesantren dengan total santri mencapai

40.108 santri. Sebagian pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga mengelola lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah pesantren terbanyak di DIY, yaitu 155 pesantren dengan total santri mencapai 14.530. Data ini menunjukkan perkembangan pesantren yang cukup pesat di Sleman dan menjadi potensi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, sepuluh pesantren memiliki jumlah santri yang relatif besar, antara 100 hingga 2000 santri. Salah satu yang menonjol diantara sepuluh tersebut adalah pesantren MBS yang memiliki jumlah santri dan tenaga pengajar yang besar sehingga menjadi objek menarik dalam konteks pengelolaan aset wakaf secara produktif.

Tabel 1. 1 Data Pesantren di DIY

No	Kabupaten	Total Pesantren	Total Santri	Total Ustadadz/Pengajar
1	Kulon Progo	70	2.986	278
2	Bantul	123	12.694	1.133
3	Gunung Kidul	51	4.565	438
4	Sleman	155	14.530	1.069
5	Kota Yogyakarta	39	5.333	385

Sumber: EMIS Kemenag DIY

Tabel 1. 2 Data Pesantren di Wilayah Kabupaten Sleman

KOTA/KAB.	NAMA LEMBAGA	PROGRAM/ JENJANG	SANTRI			USTAD		
			L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
Sleman	Muhammadiyah Boarding School	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	977	669	1646	56	56	112
Sleman	Modern Miftahunnajah	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	144	229	373	42	33	75
Sleman	Shohibul Qur'an	Kitab Kuning	371	392	763	36	30	66
Sleman	Taruna Al Quran	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	127	131	258	34	12	46
Sleman	Al Anshar	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	204	113	317	34	0	34
Sleman	Ibnul Qoyyim	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	0	135	135	3	22	25
Sleman	Sunni Darussalam	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	25	54	79	11	12	23
Sleman	Pangeran Diponegoro	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	1284	830	2114	15	8	23

KOTA/KAB.	NAMA LEMBAGA	PROGRAM/ JENJANG	SANTRI			USTAD		
			L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
Sleman	Bina Umat	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	224	181	405	7	14	21
Sleman	Daarul `Ilmi	Kitab Kuning Pondok Pesantren PSP	49	59	108	10	11	21

Sumber: EMIS Kemenag Sleman

Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta merupakan pondok pesantren dibawah naungan organisasi masyarakat Muhammadiyah yang didirikan pada 2008 diatas tanah kesultanan *(sultan ground)* di jalan Piyungan, Yogyakarta. Seiring dengan pesatnya perkembangan institusi, baik dari jumlah santri maupun aktivitas pendidikan, kebutuhan operasional pesantren meningkat secara signifikan. Menyadari tantangan tersebut, MBS membentuk divisi ekonomi dan *Wakaf Center* yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam membentuk usaha produktif dan memaksimalkan aset milik pesantren termasuk aset wakaf.

Salah satu potensi utama yang dimiliki MBS adalah adanya aset wakaf dalam jumlah besar, khususnya lahan tanah. MBS membuka donasi melalui infaq dan sedekah tahunan santri yang kemudian digunakan untuk membeli tanah serta aset lain yang selanjutnya diwakafkan kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Prambanan. Dengan demikian, dalam praktik pengelolaanya MBS sebagai *nazhir mutawalli* PCM Prambanan. Kini aset tanah wakaf milik MBS mencapai sekitar 17 Hektar, sehingga menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pesantren.

Potensi aset wakaf yang luas tersebut mendorong MBS untuk mengembangkan berbagai unit usaha produktif. Sejak awal berdirinya 2008 hingga 2025, tercatat telah berdiri 17 unit usaha, jumlah yang relatif besar bagi pesantren yang sedang berkembang. Namun demikian, dalam proses pengelolaanya, nazhir MBS menyerahkan pada manajemen Hasbuna Business Center (HBC) dengan tujuan menciptakan profesionalisme dan kinerja yang optimal. Pemisahan struktur kelembagaan ini menjadi tantangan tersendiri, karena berpotensi menciptakan jarak antara lembaga pengelola

wakaf (nazhir) dengan unit usaha produktif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas pengelolaan.

Guna menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka penilaian berbasis evaluasi yang dilakukan Badan Wakaf Nasional (BWI) dengan Indeks Wakaf nasional (IWN) yang meliputi faktor regulasi, kelembagaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta dampak sosial ekonomi. Melalui analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai praktik pengelolaan wakaf di MBS.

Upaya penguatan ekonomi pesantren melalui pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah strategis sebagaimana ditunjukkan oleh Universitas Al-Azhar Mesir yang dikenal sukses dalam mengelola aset-aset wakafnya untuk mendukung keberlanjutan pendidikan islam. MBS berusaha menapaki jalur serupa melalui pembentukan divisi ekonomi dan *Wakaf Center* sebagai langkah awal mewujudkan pesantren yang berdaya secara ekonomi dan berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan pemaparan dalam kanal YouTube MQFM (2022), diketahui bahwa *Wakaf Center* masih pada tahap pembenahan untuk mencapai tahap operasional yang optimal. Oleh karena itu, MBS Yogyakarta menjadi objek yang relevan untuk dikaji lebih dalam khususnya dalam konteks optimalisasi wakaf produktif sebagai strategi kemandirian ekonomi pesantren.

Berdasarkan latar belakang diatas, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam terkait implementasi pengelolaan wakaf produktif milik pesantren, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren: Studi pada Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf dilingkungan pesantren, serta mengeksplorasi peran nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf guna mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Pemilihan MBS Yogyakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada kepemilikan aset wakaf yang besar serta

kebutuhan operasional yang tinggi seiring berkembangnya jumlah santri, pengajar dan aktivitas pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis terhadap pengembangan model pengelolaan wakaf produktif dilingkungan pesantren dan lembaga islam pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pesantren dalam mengoptimalkan aset wakaf yang dimiliki melalui unit usaha produktif guna mewujudkan kemandirian ekonomi berdasarkan standar evaluasi Indeks Wakaf Nasional (IWN) Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran pesantren dalam mengoptimalkan aset wakaf yang dimiliki melalui unit usaha produktif serta mengevaluasi kontribusinya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren, berdasarkan standar pengelolaan wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI).

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi islam dalam keilmuan *community development* dan manajemen wakaf.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pesantren

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan rekomendasi strategi konkret dalam memanfaatkan aset wakaf agar lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pada pesantren.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, BWI dan lembaga lainnya dalam merumuskan kebijakan untuk mengembangkan wakaf produktif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan wawasan terkait pengelolaan wakaf milik pesantren dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengelola wakaf secara produktif.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan agar penulisan penelitian berjalan secara terstruktur dan sistematis. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian dilakukan, khususnya terkait potensi wakaf milik pesantren yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang difokuskan pada peran pesantren dalam mengoptimalkan aset wakafnya, tujuan dan penelitian serta sistematika penulisan secara menyeluruh.

Bab II: Telaah Pustaka

Telaah pustaka membahas hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan berfungsi sebagai fondasi teoritis. landasan teori yang relevan dengan penelitian. Selain itu, bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan fokus penelitian antara lain teori optimalisasi, wakaf produktif dan kemandirian ekonomi pesantren.

Bab III: Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Pesantren MBS Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis mengunakan metode Miles dan Huberman, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan hasil temuan dari penelitian terkait pengelolaan aset wakaf di pesantren MBS Yogyakarta, peran nazhir atau pengelola pesantren dalam memaksimalkan wakaf dengan teori dan indikator dari Badan Wakaf Indonesia yang diuraikan secara deskriptif naratif menjawab dari rumusan masalah sebelumnya.

Bab V: Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran atas temuan penelitian, baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun untuk pihak-pihak terkait dilokasi penelitian.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Bab ini menyajikan berbagai teori yang mendukung pembahasan mengenai wakaf pesantren untuk kemandirian ekonomi pesantren. Informasi dalam telaah pustaka ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal terakreditasi (SINTA), garuda, situs web resmi dan proceeding ilmiah untuk memberikan wawasan yang komprehensif, Pembahasan pada teori ini meliputi wakaf produktif, pesantren dan kemandirian ekonomi pesantren. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

1. Penelitian Faiza et al. (2023) dengan judul "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) dan Bisnis Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur" menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan. Penelitian Faiza menjelaskan bahwa dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) yang dikelola pesantren mampu mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Pesantren tidak hanya berfokus pada pengajaran pendidikan agama, melainkan juga mengelola unit bisnis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pesantren Tebuireng dan Gontor yang dinilai berhasil memproduktifkan wakaf untuk menciptakan kemandirian ekonomi lembaga. Penelitian Faiza et al. relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran pesantren dalam mengembangkan potensi keuangan publik islam sebagai strategi keberlanjutan pendidikan. Namun perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Faiza ada pada metode yang digunakan. Penelitian Faiza menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk menggali lebih dalam praktik pengelolaan wakaf secara langsung di lingkungan pesantren. Penelitian Faiza juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari

Faozan dan Supratno (2022) yang meneliti manajemen wakaf di Pesantren Tebuireng.

2. Faozan & Supratno (2022) dalam Penelitiannya yang berjudul "Membangun Ketahanan Pangan dan Pengembangan Pondok Pesantren melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng" membahas pengelolaan wakaf di Tebuireng dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan Tebuireng berhasil bertransformasi mengembangkan wakaf menjadi produktif guna mendukung keberlangsungan pesantren dan ketahanan pangannya. Tebuireng mengembangkan tanah wakafnya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan dakwah. Pengelolaan wakaf ini tidak hanya menopang kebutuhan operasional pesantren tetapi juga memperkuat ketahanan pangan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Persamaan antara penelitian Faozan dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai integrasi pengelolaan wakaf dalam konteks pesantren, namun perbedaanya terdapat pada tujuan utama penelitian. Penelitian Faozan menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf produktif dalam mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi pesantren.
3. Mulia Rahman & Tanjung (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk memperkuat Sistem Ketahanan Pangan", menyoroti peran strategis wakaf produktif dalam mendukung sistem ketahanan pangan. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dan menekankan pentingnya ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan mencakup pada produksi, stok gudang, manajemen penyimpanan yang baik dan aksesibilitas yang terjamin untuk masyarakat. Ketersediaan pangan ini dapat diwujudkan melalui wakaf yang diinvestasikan pada sektor keuangan dan sektor riil seperti pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan

dan pengembangan perkebunan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wakaf memiliki fleksibilitas dalam waktu, jumlah maupun penerimanya sehingga dampaknya bersifat abadi dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengoptimalisasian wakaf produktif dapat menciptakan sistem ketahanan pangan jangka panjang terutama dalam menghadapi krisis di masa mendatang. Penelitian Mulia Rahman memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu optimalisasi wakaf produktif sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan dalam pendekatan metode penelitian dan konteks penelitian. Penelitian Rahman bersifat kontekstual dan makro melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan kontekstual melalui studi lapangan, dengan fokus pada pengelolaan wakaf produktif di salah satu lembaga yaitu pesantren MBS Yogyakarta.

4. Sultan Antus NAsrudin Muhammad & May Mualimah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Lampung Selatan" menekankan bahwa optimalisasi wakaf produktif tidak hanya memerlukan konsep yang matang tetapi juga membutuhkan strategi implementasi yang tepat. Hal ini ditekankan dalam penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif studi lapangan di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses administratif dan teknis pengelolaan wakaf, mulai dari penyerahan harta wakaf oleh *wakif* (orang yang berwakaf), pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke PPAIW hingga pengelolaannya. Salah satu poin penting yang diangkat dalam penelitian Sultan adalah peningkatan mutu nazhir (pengelola wakaf) agar harta wakaf menjadi produktif melalui pengelolaan yang baik. Dalam hal ini BWI Lampung Selatan memprioritaskan pembinaan nazhir untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola harta wakaf. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan khususnya dalam pendekatan studi lapangan dan perhatian terhadap peran nazhir. Perbedaanya terdapat pada kerangka analisis. Penelitian Sultan mengkaji pengelolaan wakaf

secara umum dalam satu wilayah, sementara penelitian ini menggunakan acuan sistematis yakni Indeks Wakaf Nasional (IWN) dari BWI sebagai standar evaluatif dalam menilai optimalisasi wakaf produktif dilingkungan pesantren.

5. Ardiyansyah & Kasdi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah" membahas tentang pemahaman dan pemberdayaan aset wakaf di kalangan umat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wakaf produktif untuk tercapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi empat masalah utama dalam dakwah islam yaitu kemiskinan, keterbelakangan, ekslusivitas dan mekanisme kelembagaan yang lemah. Hasil penelitian menekankan pentingnya pengelolaan aset wakaf yang optimal berdasarkan tiga prinsip utama yakni pola manajemen terintegrasi, peran nazhir profesional dan transparansi dalam pengelolaan dana. Penelitian Rian relevan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, yakni menganalisis penyebab belum optimalnya suatu aset wakaf. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus objek yang diteliti, yaitu optimalisasi wakaf produktif terutama dalam aspek manajemen, peran nazhir dan transparansi. Namun penelitian ini memiliki cangkupan yang lebih spesifik karena fokus pada peningkatan kesejahteraan pesantren melalui pendekatan studi lapangan bukan hanya konseptual.
6. Masrur & Arwani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren" membahas upaya kemandirian ekonomi pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan di Pondok Pesantren Walindo Kabupaten Pekalongan dan berfokus pada langkah-langkah strategis yang diterapkan pesantren untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dinilai sangat penting guna mendukung biaya

operasional pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Strategi yang diterapkan Pesantren Walindo seperti membentuk Usaha Produktif, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan santri dan menjalin kolaborasi dengan komunitas luas guna menciptakan hubungan saling menguntungkan yang mendukung kegiatan ekonomi pesantren. Pesantren Walindo dianggap sebagai contoh yang berhasil dalam mengembangkan ekonomi pesantren secara mandiri sehingga penelitian Masrur relevan sebagai referensi dalam penelitian ini. Kesamaan penelitian Masrur dan penelitian ini terletak pada fokus tercapainya kemandirian ekonomi pesantren. Namun perbedaanya terletak pada objek dan pendekatan. Penelitian Masrur meneliti pesantren yang telah mencapai kemandirian ekonomi, sementara dalam penelitian ini mengambil pesantren yang masih dalam tahap pengembangan menuju kemandirian ekonomi, dengan fokus pada optimalisasi satu instrumen utama, yaitu aset wakaf.

7. Penelitian Masrur diperkuat dengan penelitian Febrianty (2024) yang juga menggunakan metode kualitatif studi lapangan. Dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren", Febrianty melakukan studi kasus pada Pesantren Trubus Iman di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sistem manajemen wakaf produktif. Pesantren Trubus Iman memanfaatkan aset wakafnya dengan strategi yang diterapkan dengan mengintegrasi dengan ekonomi lokal, pendampingan oleh lembaga lain dan pemanfaatan tanah wakaf untuk agribisnis sesuai potensi geografis dan kebutuhan masyarakat. Trubus Iman juga membentuk *Trubus Enterprise* untuk memastikan manajemen usaha yang terstruktur, efisien dan efektif. Penelitian Febrianty memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti peran wakaf produktif dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Perbedaanya terletak pada pemilihan objek penelitian.

8. Nasrullah et al. (2023) melakukan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Raudhatus Salam Berbah, Sleman, dengan penelitian berjudul "Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Agribisnis". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas intevensi. Sebelum program ini dijalankan, Pesantren Raudhatus Salam bergantung pada uang biaya mahasiswa dan sumbangan dermawan. Pesantren memiliki tiga lokasi lahan wakaf kosong yang belum dimanfaatkan, sehingga menghadirkan peluang pengembangan ekonomi melalui agribisnis budidaya tanaman pisang. Program ini berhasil mengurangi ketergantungan pesantren pada pendanaan eksternal sekaligus menciptakan model ekonomi mandiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta serta memanfaatan aset lahan wakaf milik pesantren. Penelitian Nasrullah memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus wakaf dan tujuan mewujudkan kemandirian pesantren. Perbedaanya terletak pada pendekatan, penelitian Nasrullah menekankan pada intervensi langsung melalui program pelatihan dan pengembangan, sedangkan penelitian ini bersifat eksploratif dan evaluatif dengan mengkaji implementasi dan optimalisasi wakaf produktif yang telah dilakukan oleh pesantren tanpa intervensi langsung dalam bentuk program.
9. Gufronul (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Gaya Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren" menyoroti peran kiai atau pemimpin pesantren dalam membina kemandirian ekonomi pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara di Pondok Pesantren Miftahul Midad Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kiai memiliki peran penting dalam menavigasi tantangan yang dihadapi oleh pesantren ditengah masyarakat modern dan memastikan keberlanjutan ekonomi pesantren melalui kepemimpinan inovatif dan strategis. Penelitian Ghufronul memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam

hal fokus pada peran pesantren yang diwakili oleh pimpinannya dalam mencapai kemandirian ekonomi pesantren. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan instrumen yang digunakan. Penelitian Ghufronul lebih menekankan pada aspek kepemimpinan, sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan penggunaan instrumen keuangan publik islam yaitu wakaf sebagai instrumen utama mencapai tujuan kemandirian ekonomi pesantren.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat maupun kemandirian pesantren. Namun sebagian besar penelitian berfokus pada pesantren yang telah mapan seperti Tebuireng, Walindo, Gontor maupun Trubus Iman serta lebih menekankan pada aspek tertentu maupun sebatas konseptual atau kajian kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pesantren yang masih dalam proses membangun kemandirian dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif yaitu Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang mencakup aspek administrasi wakaf hingga dampak pengelolaanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menggambarkan sejauh mana pesantren berupaya memaksimalkan aset wakafnya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi secara mandiri tanpa intervensi program dari peneliti sekaligus menawarkan perspektif evaluatif berdasarkan standar yang lebih sistematis.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata *"waqafa"* yang bermakna *"al-habs"* (menahan). Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta dengan mengambil manfaatnya tanpa habis seketika dan digunakan untuk perkara mubah serta dimaksudkan untuk ridho allah SWT. Menurut istilah fiqh, ahli

fiqh berpendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah dalam Kamilatul Hasanah (2023) mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda dimana kepemilikannya tetap menjadi milik *wakif* namun dipergunakan dalam rangka untuk mengambil manfaat pada benda tersebut untuk digunakan dalam kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka si wakif dibenarkan jika akan menariknya kembali atau menjualnya. Hal ini dikenal dengan konsep wakaf kontemporer, yakni wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, seperti tahunan. Selama periode tersebut, manfaat dari harta wakaf disalurkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat) dan setelah masa berakhir, wakif diperbolehkan untuk menarik kembali harta wakafnya. Sementara Imam Maliki dalam Kamilatul Hasanah (2023) berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun juga mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan demikian perbedaan pendapat pada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terletak pada status permanen dan kontemporernya wakaf.

Wakaf dalam kitab Fathul Qorib secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala. Dari pengertian ini esensi wakaf adalah pemanfaatan harta secara optimal dan tetap menjaga keutuhannya, artinya harta wakaf harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara

berkelanjutan tanpa mengurangi atau merusak nilai pokok harta wakaf.

Menurut Imam Ibn Qudamah dalam Kamalia & Erly Rizky seorang ulama kontemporer bermazhab hambali mendefinisikan wakaf dengan dengan bahasa sederhana:

تَحْبِيْسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ المَنْفَعَةِ

"Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan"

Teori Imam Ibn Qudamah menegaskan prinsip dasar wakaf yaitu menjaga keutuhan aset pokok sementara manfaat dari aset tersebut disalurkan. Konsep Ibn Qudamah sejalan dengan praktik wakaf produktif pada masa kini, dengan demikian pendapat ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan wakaf produktif dalam konteks modern.

Badan Wakaf Indonesia disingkat BWI juga telah mengeluarkan peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 yang mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan definisi diatas maka wakaf adalah menahan benda wakaf *(mauquf)* dengan waktu terbatas maupun selama-lamanya serta menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umat.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum wakaf tidak disebutkan secara langsung, namun dapat ditafsirkan menyerupai infaq, sedekah dan wakaf dengan garis merah, seperti halnya pada ayat berikut:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ
سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Dalam Q.S Al-Baqarah: 261, Allah memberikan perumpamaan bahwa infak dijalan-Nya dengan niat ikhlas diibaratkan seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada tujuh tangkai terdapat seratus biji, sehingga menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Ayat ini tidak hanya menunjukkan pahala yang besar bagi pelaku infak, tetapi juga memuat gambaran filosofi tentang pentingnya amal yang memberikan manfaat jangka panjang. Konsep ini sejalan dengan konsep wakaf produktif, dimana aset wakaf yang di wakafkan oleh wakif dan dikelola dengan baik akan memberikan manfaat berkelanjutan dan orang yang memberikan hartanya tersebut akan mendapatkan pahala yang mengalir selama harta tersebut memberikan manfaat.

Literatur fikih menjelaskan bahwa wakaf atau hasilnya boleh digunakan untuk kepentingan ibadah (pembangunan masjid), lembaga pendidikan dan para gurunya, kebutuhan minum, pengurusan mayit seperti pembelian kain kafan, pembangunan dan rehabilitas jembatan, untuk para penghuni penjara, rumah sakit, perpustakaan, pembangunan hotel atau pemondokan untuk para musafir, dan lainnya. Bahkan berbeda dengan sedekah lainnya, sebagian wakaf atau manfaatnya pun,

seperti buku dan Al-Qur'an, boleh didistribusikan atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang tidak berhak menerima zakat.

b. Wakaf Produktif

Menurut Munzir Qahf dalam Manan (2016) wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk produksi, baik dibidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung melainkan dari keuntungan bersih hasil dari pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Pendapat Kahf selaras dengan Jaih Mubarok, bahwa wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan manfaat wakaf. Menurut Mundzir Qahf, wakaf produktif adalah mengalihkan aset konsumtif ke arah produksi dan investasi yang menghasilkan sesuatu di masa depan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun umum.

Menurut Sukiro (1997) kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata product yang dapat diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal minimum. Menurut kamus Bahasa Indonesia kata produktif berarti mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan proses pengelolaan wakaf secara profesional melalui proses usaha di berbagai bidang usaha barang dan jasa untuk menghasilkan manfaat yang lebih banyak dari aset wakaf.

3. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata optimal berarti terbaik atau tertinggi, sedangkan optimalisasi diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu

dalam kondisi paling baik atau paling tinggi. Dengan demikian, optimalisasi adalah upaya untuk memaksimalkan potensi atau fungsi sesuatu dan menjadikan hal tersebut menjadi paling baik.

Winardi et al. mendiskripsikan optimalisasi sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Artinya, usaha untuk memaksimalkan kekuatan atau potensi sehingga terwujud keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Sementara itu, W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan optimalisasi sebagai suatu hasil yang dicapai sesuai keinginan, sehingga dapat difahami optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, optimalisasi diartikan sebagai langkah atau metode yang digunakan untuk mengelola aset wakaf secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat terbaik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Optimalisasi erat berkaitan dengan kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan serta dilakukan secara terarah dengan pendekatan efektif dan efisien.

b. Indikator Optimal Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran atau kinerja tertentu. Untuk menilai bahwa aset wakaf tersebut sudah masuk kategori optimal atau belum, diperlukan indikator sebagai acuan dalam mengukur kinerja wakaf. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan merujuk Indeks Wakaf Nasional 2022 yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Nasional (BWI). Model IWN diperkenalkan oleh Sukmana et al. (2021) yang di gunakan untuk mengukur kinerja wakaf pada level nasional maupun subnasional. Secara konseptual indikator yang terkandung didalam IWN bersifat universal dan dapat diadaptasikan ke lembaga mikro seperti pesantren, yang secara struktural termasuk dalam bagian

entitas subnasional. Meskipun dirancang untuk penggunaan skala makro, indikator IWN dapat berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap implementasi pengelolaan wakaf di tingkat lembaga mikro termasuk lembaga pesantren. Dalam konteks Pesantren MBS Yogyakarta, lembaga berperan sebagai *nazir mutawalli* dari PC Muhammadiyah Prambanan, sehingga memiliki fungsi kelembagaan wakaf yang utuh. Dengan demikian penggunaan IWN dalam penelitian ini menjadi relevan karena mampu menilai sejauh mana pengelolaan wakaf dipesantren telah selaras dengan standar kelembagan yang ditetapkan oleh BWI.

Indeks ini terdiri dari enam faktor utama yang masing-masing memiliki sub indikator sebagai berikut:

1) Faktor Regulasi

Faktor regulasi adalah faktor yang mengukur sejauh mana dukungan dari otoritas/pemerintah terhadap sistem wakaf dan aktivitas wakaf. Dalam konteks penelitian tingkat lembaga faktor ini menilai sejauh mana lembaga pengelola wakaf memahami, menyesuaikan dan menimplementasikan kebijakan pemerintah. Terdiri atas tiga subbab yaitu:

a. Dukungan Regulasi

Dalam dukungan regulasi berkaitan dengan pertanyaan tentang undang-undang atau peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf dan sejauh mana lembaga memiliki pemahaman dan kesiapan terhadap peraturan wakaf nasional serta mampu menurunkan regulasi tersebut dalam kebijakan internal pesantren.

b. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran mengukur sejauh mana pemerintah mengalokasikan dana atau anggaran khusus dalam mendukung pengembangan sektor wakaf

c. Dukungan Pelatihan

Dukungan pelatihan berkaitan dengan pertanyaan seberapa sering adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada nazhir guna meningkatkan kapasitas manajerial dan pengelolaan wakaf.

2) Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan merupakan faktor yang menilai kualitas dan kapasitas kelembagaan wakaf (nazhir). Terdiri atas dua sub indikator:

a. Kualitas Manajemen nazhir

Kualitas manajemen nazhir terkait dengan pertanyaan apakah lembaga wakaf telah memiliki sistem manajemen yang tersertifikasi dan berstandar mutu.

b. Status nazhir

Status nazhir menilai jumlah nazhir yang tergabung dalam sebuah lembaga serta status kelembagaannya seperti bentuk organisasi atau yayasan.

3) Faktor Proses

Faktor ini melihat proses pelaksanaan wakaf. Faktor ini penting untuk memastikan pemantauan perkembangan wakaf dan untuk meningkatkan pencatatan kegiatan usaha oleh nazhir. Terdapat tiga subbab dalam faktor proses sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan berkaitan dengan besarnya keuntungan, pendapatan atau surplus yang dihasilkan oleh aset wakaf.

b. Pelaporan

Pelaporan menilai sejauh mana lembaga wakaf membuat dan menyampaikan laporan kegiatan serta laporan keuangan secara berkala dan transparan.

4) Faktor Sistem

Faktor sistem berkaitan dengan aspek-aspek pendukung kegiatan dalam proses bisnis wakaf. Dalam faktor ini terbagi menjadi tiga subbab sebagai berikut:

a. Legalitas Tanah Wakaf

Status hukum tanah wakaf menjadi pertanyaan penting terkait apakah tanah wakaf telah memiliki sertifikat resmi dari pemerintah terkait.

b. Kepatuhan Syariah

Dalam kepatuhan syariah terkait dengan pertanyaan struktur organisasi badan wakaf yang memiliki dewan pengawas syariah sebagai pengawas nazhir dalam menjalankan kegiatannya.

c. Manajemen Informasi Publik

Manajemen informasi publik mengukur keberadaan media informasi publik yang digunakan dalam menyampaikan aktivitas wakaf seperti website, sosial media atau platform digital lainnya.

5) Faktor Hasil

Faktor hasil berkaitan dengan produktivitas aset wakaf dan jangkauan manfaat wakaf. Faktor hasil penting untuk dijadikan indikator guna meningkatkan kepedulian terhadap wakaf produktif dan meningkatkan penerima manfaat wakaf. Faktor ini menjadi tolok ukur keberlanjutan dan inklusivitas program. Dalam faktor ini terdapat dua subbab sebagai berikut:

a. Rasio wakaf produktif

Rasio wakaf produktif mengukur presentase unit wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan seluruh unit wakaf yang ada.

b. Jangkauan penerima manfaat *(Mauquf Alaih)*

Jaungkauan penerima manfaat berkaitan dengan jumlah penerima manfaat dari kegiatan wakaf yang dikelola.

6) Faktor Dampak

Faktor dampak menilai dampak jangka panjang dari pengelolaan wakaf terhadap lingkungan dan masyarakat, terdiri dari dua sub indikator sebagai berikut:

a. Kemandirian

Pada kemandirian mengukur sejauh mana kegiatan wakaf dapat menciptakan kemandirian finansial lembaga atau penerima manfaat.

b. Infrastruktur wakaf

Menilai kontribusi wakaf terhadap pembangunan atau memperkuat infrastruktur sosial ekonomi seperti pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit dan lain sebagainya.

2. Pesantren

Mujamil Qomar dalam Majid et al. (2023) memberikan definisi bahwa pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana para santri mendapatkan pendidikan agama Islam dengan sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan seorang atau beberapa.

Pondok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai madrasah atau asrama, tempat mengaji atau belajar islam untuk santri. Pondok merupakan unsur penting yang mendasar pertama dalam sebuah pesantren. Asrama ini disediakan oleh kiai sebagai pengasuh pesantren yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya proses pendidikan dalam pesantren yang dipimpin. Maka asrama juga menjadi

semacam fasilitas sekaligus unsur pokok dalam pesantren, sekalipun kondisi asrama masih sederhana sekalipun.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di indonesia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan hingga menjaga eksistensi pendok pesantren itu sendiri. Halim (2005) menjelaskan terkait perubahan yang harus dilakukan pesantren, terdapat lima perubahan, yaitu adanya pengembangan SDM pesantren. *Kedua* pengembangan manajemen. *Ketiga*, pengembangan komunikasi. *Keempat*, pengembangan sanitasi dan *kelima*, pengembangan ekonomi pondok pesantren. Berdasarkan keterangan Halim tersebut penting bagi pondok pesantren untuk melakukan perubahan terkait dengan pengembangan ekonomi pesantren guna menunjang ke empat perubahan lainnya yang telah dijelaskan

3. Kemandirian Ekonomi

a. Kemandirian

Menurut Watson dalam Fauzul et al. (2022), kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Mu'tadin dalam Majid et al. (2023) menambahkan, kemandirian mengandung makna: (a) suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk untuk maju demi kebaikan dirinya, (b) mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Bentuk-bentuk Kemandirian sebagaimana pendapatnya Robert Havighurst dalam penelitian Masrur & Arwani (2022) "Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren" terdapat 4 bentuk kemandirian :

1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya sendiri
2) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi masalahnya sendiri
3) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lainnya tanpa orang lain
4) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi ekonominya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil keterangan bahwa kemandirian adalah keinginan dan kemampuan untuk mengambil keputusan atas diri seseorang/lembaga dalam mengerjakan tugas dan amanah yang diembannya.

b. Kemandirian Ekonomi Pesantren

Kemandirian ekonomi pesantren menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan untuk mendorong segala aktivitas yang dijalankan oleh lembaga pesantren. Pendapat Robert Harvighust dapat dipahami bahwa kemandirian ekonomi pesantren merupakan kemampuan pesantren untuk mengatasi ekonominya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dalam konteks pesantren setidaknya terdapat tiga potensi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian ekonomi, pertama potensi santri, kedua potensi masyarakat sekitar pesantren serta potensi zakat dan wakaf. (Masrur & Arwani, 2022)

Dari ketiga potensi tersebut, wakaf menjadi salah satu aspek menarik untuk diteliti lebih lanjut melalui optimalisasi pengelolaan wakaf. Mengoptimalkan potensi wakaf dapat mendukung fungsi pesantren dengan sumber pendanaan berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebih pada pihak eksternal. Dengan demikian wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga

berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian pesantren.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana optimalisasi wakaf produktif dapat mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas dan dinamika permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi pesantren. Dalam proses penelitian, peneliti akan berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pengelola wakaf, pimpinan pesantren, serta pihak terkait lainnya, guna memperoleh data yang autentik dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan data yang ditemukan di lapangan untuk membangun hipotesis atau pola-pola baru. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai optimalisasi wakaf produktif di lingkungan pesantren.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Jalan Piyungan KM. 2, Marangan, Bokoharjo, Prambanan, Majasem, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572. Pemilihan objek ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai para pemangku jabatan dan pengambil keputusan dalam pengelolaan aset wakaf di pesantren. Peneliti akan menanyakan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh pemangku jabatan dalam mengoptimalkan aset wakaf, serta strategi yang diterapkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2025 sampai dengan AgUstadus 2025. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebijakan dari pihak objek penelitian.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pondok pesantren, dengan studi kasus pada Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta. Pesantren ini dipilih karena dianggap dapat menjadi contoh dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset wakaf. Peneliti akan mengkaji bagaimana pesantren tersebut mengelola aset wakaf yang dimiliki, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf guna mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu seperti manusia (narasumber), artefak dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013)

1. Data Primer

   Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para informan kunci di lingkungan pesantren MBS Yogyakarta. Informan dipilih dipilih berdasarkan peran strategis dan keterlibatannya dalam mengelola aset wakaf. Adapun sumber utama dalam penelitian ini meliputi:

   a. Pimpinan Pesantren

      Pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam struktur pesantren, terlibat dalam pengambilan keputusan serta mengetahui visi dan arah kebijakan pesantren.

   b. Pengurus Yayasan

Pihak pengelola teknis aset wakaf yang mengetahui dan memahami proses pengelolaan aset wakaf secara detail.

c. Santri

Pihak penerima manfaat langsung dari adanya pengelolaan wakaf. Santri dipilih sebagai narasumber untuk memberikan perspektif mengenai dampak pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan dan kualitas kehidupan dipesantren.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen pendukung data primer berupa foto dan arsip dokumen lainnya yang berkaitan dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap paling strategis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah proses mengumpulkan keterangan data dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada sumber data primer yakni pengurus/nazhir yang bersangkutan dengan optimalisasi wakaf produktif diantaranya Pimpinan MBS Yogyakarta, Pengurus MBS Yogyakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penentuan narasumber, peneliti akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan pesantren yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan operasional pesantren. Beberapa narasumber yang ditentukan sebagai berikut:

a. Pengasuh atau Pimpinan Pesantren,

Pimpinan pesantren merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur kepemimpinan pesantren dan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputuasan strategis termasuk dalam

pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menetapkan satu narasumber dari kalangan pimpinan pesantren yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan arah kebijakan lembaga pesantren.

b. Pengurus yayasan

Pengurus Yayasan merupakan pihak yang mengelola aset pesantren termasuk aset wakaf. Dalam hal ini, pengurus yayasan juga bertugas sebagai nazhir pelaksana yang menjalankan fungsi operasional wakaf. Penelitian ini melibatkan narasumber dari pengurus yayasan dengan kriteria sebagai berikut:

1.) Terlibat aktif dalam pengelolaan aset pokok wakaf
2.) Memiliki peran langsung dalam kegiatan operasional harian terkait pengelolaan wakaf.

c. Santri

Santri merupakan pihak yang dapat memberikan perspektif mengenai dampak pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan dipesantren. Narasumber dari kalangan santri dipilih satu santri putra dan satu santri putri dengan kriteria berikut:

1.) Santri kelas akhir atau santri pengabdian
2.) Telah tinggal di pesantren minimal 5 tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan informasi yang reflektif dan komprehensif

Narasumber ini dipilih oleh pimpinan pesantren karena sebelumnya tidak terdapat hubungan atau mengenal dengan narasumber sebelum adanya wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk arsip, dokumen, gambar atau laporan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2013). Dokumen terkait wakaf milik MBS Prambanan Yogyakarta

dikumpulkan dan dipelajari sebagai pelengkap data hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan orang yang memiliki peran besar dalam penentuan data yang diperoleh (Sugiyono, 2013). Maka, instrumen utama penelitian ini adalah penulis sendiri.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman dengan urutan analisis pengumpulan data (*data collection),* reduksi data *(data reduction),* penyajian data (*data display)* dan penarikan kesimpulan (*verification)*.

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mana pengumpulan kedua teknik tersebut bersumber dari MBS Yogyakarta.

2. Reduksi Data

   Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data dengan beberapa langkah analisis seperti meringkas data langsung, dokumen yang relevan, pembuatan catatan objektif dan analisis antar lokasi. Reduksi data artinya merangkum, memilah, memilih hal pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal penting dengan mencari tema dan polanya. Maka dengan melakukan reduksi data akan didapatkan gambaran yang jelas.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan sudah memiliki alur tema yang jelas berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan dapat menarik garis kesimpulan.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi atas temuan yang di peroleh selama masa penelitian sehingga dari kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Keabsahan data

Dalam proses penulisan kesimpulan hasil dari penelitian, diperlukan verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Teknik

Penelitian ini menggunakan dua metode utama yaitu, wawancara dan dokumentasi. Kedua metode ini saling melengkapi untuk memperkuat data yang disampaikan narasumber. Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari tiga kriteria, yaitu *pertama,* pengasuh pesantren selaku pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di pesantren, *kedua* nazhir pelaksana atau pengurus yayasan, selaku pengelola langsung terhadap aset wakaf. *ketiga* santri, selaku pihak yang dapat di ambil keterangan untuk pengukuran dampak adanya wakaf produktif pesantren.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai

narasumber. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan data yang diperoleh dari tiga kelompok informan, yaitu:

a. Pimpinan Pesantren memberikan informasi mengenai visi, kebijakan dan arah pengembangan pengelolaan aset wakaf dalam mendukung kemandirian ekonomi
b. Pengurus Yayasan memberikan data terkait pengelolaan secara teknis dan strategi implementasi wakaf produktif
c. Santri memberikan perspektif terhadap dampak nyata adanya pengelolaan wakaf produktif.

Dengan membandingkan data yang diperoleh dari ketiga narasumber tersebut, maka dapat dilakukan verifikasi silang untuk menilai sejauh mana informasi yang diberikan konsisten, akurat, mendalam, sehingga memperkuat validitas temuan dalam penelitian ini.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta

1. Sejarah Singkat

Muhammadiyah Boarding School (MBS) secara resmi didirikan pada 20 Januari 2008 diatas tanah kesultanan dengan akad sewa hak pakai. MBS didirikan oleh Ustadz Muhammad Nasirul Ahsan seorang tokoh muhammadiyah Prambanan. Pendirian MBS dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap minimnya kader Muhammadiyah di wilayah Prambanan dan sekitarnya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada saat itu dinilai belum mampu menjawab kebutuhan akan regenerasi kader sehingga tercetuslah sebuah konsep sistem pendidikan terpadu yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan pesantren.

Sistem pendidikan terpadu ini awalnya diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan pandangan visi dan pendekatan antara internal pendidik SMP 1 Muhammadiyah Prambanan terkait arah pengembangan sistem pendidikan sekolah dan pesantren. Upaya mediasi dan komunikasi telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepahaman. Situasi ini mendorong salah satu kader untuk mengkonsultasikan gagasan pendirian lembaga pendidikan baru kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta. Ketua PWM saat itu Dr. H Agung Dananto, M.Ag menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sistem pendidikan terpadu melalui pendirian pesantren yang mandiri. Berbekal motivasi dari PWM, dilakukan upaya pencarian dukungan ke berbagai pihak, diantaranya Prof. Dr. Amien Rais, M.A selaku sesepuh Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah (2008) Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Ketua PP Aisyiyah Prof. Dr. Hj. Siti

Chamamah Suranto serta Wakil Bupati Sleman 2009 Drs. Sri Purnomo M.Si. kolaborasi lintas tokoh ini memberikan legitimasi dan penguatan terhadap pendirian lembaga MBS

Akhirnya dengan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta resmi berdiri sebagai lembaga pendidikan islam berbasis pesantren modern yang mengintegrasikan sistem pendidikan sekolah dan pesantren dalam satu kesatuan pendidikan yang utuh. Kini MBS Yogyakarta memiliki MTs-MA dengan jumlah santri mencapai 2600 santri dan tenaga pengajar dan karyawan sebanyak 112.

2. Profil Lembaga

- **a.** Nama Pesantren : Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School (PPM MBS) Yogyakarta
- **b.** Alamat : Jl. Piyungan KM.2 Marangan Bokoharjo Prambanan Sleman DIY
- **c.** Pendiri : KH. Nasirul Ahsan, Lc
- **d.** No Telp Pesantren : 02744542008
- **e.** Kepemilikan Tanah : Wakaf
- **f.** Luas Tanah : 17 Ha
- **g.** Status Bangunan : SHM

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR KEPENGURUSAN
MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS)
YOGYAKARTA
PERIODE 2025/2026

Pimpinan :

1. Fakih Udin, Lc.
2. Didik Riyanta, S.Sos.I
3. M. Fauzan Yakhsya S.Hum

Sekretaris Umum : M. Abdi Fattah, Lc

Bendahara Umum : Rinna Fitriyah, S.Pd

Kepala Kantor : H. Syamsudin, S.Kom

1. Multimedia : Noli Setiadi S.Pd
2. Humas : Wahyu Hidayat S.Pd.Si

Wakil Direktur I Bidang Pendidikan : Rahmat Susanto, S.Pd

1. Kepala SD : Rizana Avida, S.T., S.Pd
2. Kepala SMP : Chabib Ludfiansyah, S.Sos
3. Kepala SMA : Roiq, Lc

Wakil Direktur II Bidang Kema'hadan : Sahman, Lc.

1. Kepala Poskestren : Vani Aninda, A.Md.Kep
2. Kepala Asrama

Wakil Direktur III Bidang HRD : Suryanto, S.Pd

Wakil Direktur IV Bidang Rumah Tangga : Suwardi

1. Kepala Sarana Prasarana : Zainal Abidin
2. Kepala Pengelolaan Aset : Heri Santosa, A.Md

Wakil Direktur V Bidang ARF : Fajar Shadik

Kepala LAZISMU : Odjie Samrodi, S.E., MM

4. Visi – Misi Pesantren

a. Visi

Terbentuknya lembaga pendidikan pesantren yang berkualitas dalam menyiapkan kader muhammadiyah berdasarkan al-qur'an dan sunnah

b. Misi

Guna mewujudkan visi pesantren Muhammadiyah Boarding School, diperlukan misi dengan arah yang jelas. Misi Muhammadiyah Boarding School disusun berdasarkan visi diatas, sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan Pendidikan Pesantren integras yang memadukan kurikulum pendidikan pesantren dan kurikulum pendidikan nasional
2) Menjadikan lembaga pendidikan yang senantiasa memelihara nilai-nilai ajaran islam berdasarkan al-qur'an dan sunnah
3) Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan kader-kader muhammadiyah yang siap melaksanakan dakwah islam amar ma'ruf nahi munkar
4) Menyiapkan calon pemimpin yang jujur, amanah, cerdas dan berwawasan luas serta bertanggung jawab.
5) Menyelenggarakan pendidikan yang menyiapkan santri sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna nilai-nilai islam khususnya bagi santri dan umat pada umunya.

5. Aset Wakaf Yang Dimiliki

Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta mengalami perkembangan yang begitu pesat. Seiring dengan meningkatnya jumlah santri tentu kebutuhan pendukungnya juga semakin besar. Untuk memenuhi kebutuhan ini, MBS menghimpun dana melalui berbagai instrumen filantropi islam antara lain zakat, sedekah, infaq dan juga wakaf. Salah satu bentuk kontribusi yang signifikan adalah dalam bentuk tanah wakaf.

Tanah wakaf diperoleh melalui mekanisme pembelian oleh MBS dengan menggunakan dana terbuka yang berasal dari iuran tahunan santri (Ustad Suwardi, wawacara, 7 Agustus 2025). Kemudian tanah yang telah dibeli diwakafkan oleh MBS kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) guna menjamin keberlanjutan dan menghindari potensi sengketa kepemilikan dimasa depan. Dalam pengelolaanya aset wakaf diserahkan kepada nazhir mutawalli untuk dioptimalkan penggunaanya. MBS Yogyakarta kini memiliki total tanah wakaf seluas

17 Ha yang tersebar diberbagai wilayah sekitar Bokoharjo, Prambanan (Ustad Heri, wawancara, 26 Juli 2025).

6. Usaha Produktif Berbasis Wakaf

Tanah wakaf milik MBS diantaranya digunakan untuk Usaha Produktif pesantren, dengan manajemen dibawah Hasbuna Bisnis Center (HBS). Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Hasbuna Mart

   Hasbuna mart merupakan usaha produktif pesantren yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok santri maupun masyarakat umum (Dokumentasi dan observasi lapangan, 5 agustus 2025). Adanya toko ini memudahkan akses kebutuhan sehari-hari santri tanpa harus keluar lingkungan pesantren, sekaligus salah satu sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan pesantren.



Gambar 4. 1 Hasbuna Mart

2. Hasbuna Resto

   Hasbuna Resto berdiri diatas aset wakaf sebagai bentuk pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Usaha ini melayani kebutuhan lauk pauk tambahan bagi santri dan karyawan yang menginginkan (Dokumentasi dan observasi lapangan, 5 agustus 2025).



Gambar 4. 2 Hasbuna Resto

3. Hasbuna Catering

Hasbuna Catering merupakan penyedia layanan konsumsi utama bagi santri dan seluruh karyawan di MBS mulai dari sarapan hingga makan malam. Hasbuna Catering menjadi salah satu unit usaha pertama yang dimiliki MBS sejak didirikannya pada tahun 2008 (Dokumentasi dan observasi lapangan, 5 agustus 2025). Selain melayani makan santri, Hasbuna Catering juga membuka layanan pemesanan dari luar pesantren, sehingga memberikan peluang pemasukan tambahan. Saat ini, Hasbuna Catering mempekerjakan 40 karyawan yang mayoritas dari warga sekitar MBS dan dipimpin oleh kepala unit Bapak Ristanto.



Gambar 4. 3 Hasbuna Catering

4. Hasbuna Bakery

Hasbuna Bakery merupakan unit usaha yang memproduksi berbagai jenis roti dan jajan pasar untuk kebutuhan konsumsi santri sekaligus dipasarkan secara luas kepada masyarakat umum. Usaha ini merupakan pengembangan dari Hasbuna Catering yang

mulai beroperasi pada 2017 (Dokumentasi dan observasi lapangan, 5 agustus 2025). Saat ini Hasbuna Bakery mempekerjakan 6 karyawan dibawah kepemimpinan Ibu Rumidatus Sakdiyah, S.Sos., M.Pd. Dalam satu hari, Hasbuna Bakery mampu memproduksi sekitar 3000 roti yang didistribusikan ke unit usaha ritel milik MBS dan melayani pemesanan dari pihak eksternal.



Gambar 4. 4 Hasbuna Bakery

5. Hasbuna Laundry

Hasbuna Laundry merupakan unit jasa yang bergerak dalam bidang cuci pakaian terutama seragam sekolah santri yang diwajibkan laundry ditempat ini. Kehadiran Hasbuna Laundry bertujuan untuk memudahkan pengawasan kebersihan pakaian santri sekaligus menjadi salah satu pemasukan tambahan bagi pesantren. HasLaundry mulai dirintis pada 2014 hingga kini mempekerjakan 35 karyawan dibawah kepemimpinan Ibu Tri Septi Wulandari dan Bapak Amir selaku pengawas harian. Hasbuna Laundry kini memperoleh omzet kotor bulanan antara 80 juta – 100 juta (Dokumentasi dan observasi lapangan, 18 September 2025).



Gambar 4. 5 Hasbuna Laundry

6. WaNi (Warung Rabbani)

Wani (Warung Rabbani) merupakan bentuk kemitraan MBS dengan brand Rabbani dalam bidang penjualan pakaian muslim. Usaha produktif ini merupakan pengembangan dari TokoMu dan tidak hanya untuk kalangan santri namun menjadi sarana pemasaran produk islami pada masyarakat umum sehingga dengan kemitraan ini, pesantren memperoleh manfaat keuntungan finansial dengan omset sekitar 25-30 juta perbulannya (Dokumentasi dan observasi lapangan, 18 September 2025).



Gambar 4. 6 WaNi (Warung Rabbani)

7. Sawah Padi

Aset tanah lain milik MBS dimanfaatkan untuk persawahan (Ustad Suwardi, wawancara, 7 Agustus 2025). Pengelolaan sawah padi bekerjasama dengan masyarakat lokal yang mana hasil panen padi akan diserap oleh Hasbuna Catering untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi santri, sehingga perputaran ekonomi terjaga di internal pesantren.



Gambar 4. 7 Sawah Pertanian

B. Implementasi Pesantren dalam Optimalisasi Aset Wakaf

Proses penggalian data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf milik pesantren. Dari proses tersebut diperoleh temuan awal bahwa pengelolaan aset wakaf dan administrasi wakaf berada pada lembaga atau struktur yang berbeda, yaitu nazhir menyerahkan hal pengelolaan kepada Hasbuna Bisnis Center (HBC). Analisis dalam penelitian ini mengacu pada indikator Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Nasional (BWI) sehingga hasil yang diperoleh dapat disajikan secara menyeluruh dan sistematis. Temuan lapangan dipaparkan berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai berikut :

a. Faktor Regulasi

Faktor regulasi menyoroti lembaga memahami dan mengimplementasikan kebijakan serta peraturan pemerintah terkait wakaf yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan aset wakaf maupun pengembangan unit usaha produktif. Terdapat tiga sub indikator sebagai berikut :

1) Dukungan Regulasi

Subindikator ini mengkaji sejauh mana keberadaan peraturan undang-undang atau peraturan khusus dalam

mendukung pengelolaan wakaf. Berdasarkan temuan lapangan, regulasi pemerintah dapat difahami dengan jelas oleh pengelola wakaf dan tidak menjadi hambatan dalam pengurusan maupun pengelolaan aset wakaf. Sosialisasi regulasi paling sering disampaikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (BPN ATR) yang berfokus pada pengurusan pertanahan serta oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah selaku pemilik tanah. Namun hingga penelitian ini dilakukan, lembaga khusus wakaf seperti BWI belum pernah memberikan sosialisasi atau terjun langsung ke Pesantren MBS.

Ustad Heri selaku kepala divisi wakaf dan pengembangan pesantren, menyatakan :

"Tahu akan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, dan beberapa kali mendapatkan pengarahan terkait peraturan tersebut."

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ustad Suwardi selaku Wakil Pimpinan 4 Bidang Kerumahtanggaan, menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh pengurusan aset wakaf hingga pengolahannya melalui regulasi yang ada. Ustad Suwardi menambahkan sebagai perwakilan nazhir PC Muhammadiyah Prambanan, dirinya pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), namun dalam pelaksanaan pengelolaan beliau menyatakan MBS belum secara maksimal menjalankan sesuai apa yang diarahkan oleh BWI dikarenakan adanya peta jalan sendiri di pesantren MBS.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kedua narasumber. konsistensi jawaban menunjukkan bahwa regulasi wakaf

telah dipahami dengan baik oleh pihak pengelola dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Keterangan Ustad Heri tentang pengarahan regulasi diperkuat oleh pengalaman Ustad Suwardi dalam mengikuti pelatihan resmi BWI.

2) Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran mengkaji sejauh mana lembaga menerima dukungan pemerintah berupa dana atau anggaran khusus untuk mendukung pengembangan sektor wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, Pesantren MBS sejauh ini belum pernah menerima bantuan yang dikhususkan untuk wakaf. Namun terdapat beberapa bantuan dari pemerintah yang diterima dan dimanfaatkan di atas aset wakaf milik MBS.

Ustad Heri menyampaikan :

"Untuk atas nama lembaga wakaf belum ada bantuan khusus. Namun dari Bank Indonesia atau Kementerian Ketenagakerjaan, itu pernah terima dan dana tersebut kita dirikan di aset wakaf milik MBS"

Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Ustad Suwardi, yang menjelaskan bahwa karena MBS tidak secara independen membentuk badan wakaf, pihaknya tidak pernah mengajukan bantuan pemerintah khusus untuk kemajuan wakaf. Adapun pengadaan wakaf di MBS murni hasil dari penyisihan dana utama yaitu uang iuran santri yang dibelikan aset tanah atau aset lainnya, yang selanjutnya aset tersebut diwakafkan untuk tujuan keberlanjutan dan kemaslahatan umat.

Triangulasi sumber pada sub indikator ini menunjukkan kesesuaian informasi antara kedua narasumber. Keterangan Ustad Heri tentang ketiadaan

bantuan khusus wakaf diperkuat penjelasan Ustad Suwardi mengenai alasan tidak adanya pengajuan bantuan, yaitu karena struktur lembaga wakaf di MBS tidak berdiri secara independen. Keselarasan informasi memperkuat validitas temuan bahwa dukungan anggaran pemerintah secara langsung untuk wakaf di MBS memang belum tersedia.

3) Dukungan Pelatihan

Subindikator ini mengkaji frekuensi lembaga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas manajerial nazhir dan pengelolaan wakaf. Berdasarkan temuan lapangan, bahwa sejauh ini MBS belum pernah mengikuti atau diundang untuk pelatihan wakaf dan pengembangannya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendampingan dalam pengelolaan wakaf lebih banyak diberikan oleh ormas Muhammadiyah yang diwakili oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Prambanan.

Ustad Heri selaku Kepala Divisi Wakaf dan Pegembangan Pesantren,menyampaikan :

“Belum pernah, yang banyak terjun malah PCM Muhammadiyahnya.”

Pernyataan ini dilengkapi oleh Ustad Suwardi selaku wakil pimpinan, menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) awal 2025 pernah mengadakan pelatihan nazhir, dan dirinya hadir mewakili MBS. Namun dampak dari pelatihan tersebut di lingkungan MBS tidak secara langsung dijadikan acuan pengambilan keputusan, mengingat MBS telah memiliki rencana pembangunan sendiri. Pelatihan BWI dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai standar pengelolaan wakaf yang baik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan kedua narasumber. Ustad Heri menekankan minimnya pelatihan wakaf dari pemerintah dan dominan pendampingan oleh PC Muhammadiyah Prambanan. Sementara Ustad Suwardi memberikan informasi pelengkap bahwa pernah ada pelatihan dari BWI, kegiatan tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan MBS. Kedua pernyataan ini memperkuat validitas temuan bahwa dukungan pelatihan pemerintah terhadap MBS masih terbatas, dari segi frekuensi maupun dampak terhadap pengelolaan wakaf di pesantren.

b. Faktor Kelembagaan

Pada faktor kelembagaan, indikator optimal mengacu pada internal lembaga wakaf milik pesantren dengan mengkaji kualitas manajemen nazhir dan juga status ke nazhiran. Berikut sub indikator pada faktor kelembagaan:

1) Kualitas Manajemen nazhir

Sub indikator ini mengkaji jalannya lembaga yang mengurusi wakaf di Pesantren MBS Yogyakarta dengan fokus seputar sistem manajemen dan ketugasannya. Berdasarkan temuan lapangan, Divisi Wakaf dan Pembangunan masih belum berjalan seperti yang direncanakan dan dalam pembagian tugasnya cenderung menunggu arahan dari pimpinan.

Ustad Heri menyampaikan:

"Belum ada, masih sejalannya. Belum ada evaluasi berkala dan paling kita lapor ke PCM per berapa bulan sekali. Karena yang aslinya nazhir kan di PCM Prambanan mbak, kita disini sebagai wakil tangan saja."

Pernyataan ini ditambahkan oleh Ustad Suwardi, bahwa sistem manajemen pengelolaan wakaf tidak

membuat lembaga khusus. Sebelumnya MBS memiliki unit bernama *Wakaf Center* yang tujuannya mengurus seluruh aset wakaf, namun pada 2023 unit ini dihapus dan digantikan oleh *Hasbuna Bisnis Center* (HBC). Sehingga nazhir yang ada di MBS sebatas melakukan pengurusan legalitas aset wakaf saja, sedangkan pengelolaan diserahkan HBC. Oleh karena itu audit manajerial khusus wakaf tidak ada.

Membandingkan pernyataan kedua narasumber. keterangan Ustad Heri mengenai tidak adanya evaluasi berkala sejalan dengan penjelasan Ustad Suwardi tentang penghapusan *Wakaf Center* dan peralihan fungsi ke HBC. Konsistensi informasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas manajemen nazhir di MBS masih terbatas pada fungsi administratif dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset wakaf secara menyeluruh. Dengan melakukan triangulasi teknik (Wawancara dan Dokumentasi), bahwa struktur organisasi terbaru tidak lagi memuat *Wakaf Center*.

2) Status nazhir

Status nazhir mengkaji pada jumlah nazhir yang tergabung dalam lembaga serta status kelembagaannya. Berdasarkan hasil penelitian, nazhir di Pesantren MBS Yogyakarta dibawah kewenangan kelembagaan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Prambanan. Dengan demikian status kenazhiran di MBS sebatas sebagai pengelola, bukan nazhir resmi.

Ustad Suwardi selaku Wakil Pimpinan 4 menyampaikan :

"tidak ada status kenazhiran, status nazhir pesantren adalah pembantu nazhir PCM Prambanan."

Pernyataan ini selaras dengan keterangan Ustad Heri yang sebelumnya menjelaskan bahwa staf yang mengurus aset wakaf di MBS statusnya masih belum jelas (abu-abu) dan sebatas mengurus administratif sesuai arahan pimpinan. Dengan membandingkan kedua pernyataan tersebut. Konsistensi informasi ini memperkuat temuan bahwa posisi nazhir di Pesantren MBS bukanlah entitas independen, melainkan bagian dari struktur pengelolaan wakaf PCM Prambanan.

c. Faktor Proses

Indikator faktor proses melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan wakaf dan pencatatan kegiatan yang dilakukan. Terdapat tiga subindikator dalam faktor proses sebagai berikut :

1) Pengelolaan

Indikator ini mengkaji sejauh mana pengelolaan aset wakaf di Pesantren MBS Yogyakarta. Temuan dilapangan aset wakaf milik MBS telah dimanfaatkan secara produktif dan tidak dibiarkan terbengkalai. Beberapa tanah wakaf digunakan untuk pembangunan Usaha Produktif pesantren dengan manajemen dibawah *Hasbuna Business Center* (HBC), tercatat terdapat 7 Usaha Produktif yang beroperasi diatas aset wakaf, yaitu ; Hasbuna Mart, Hasbuna Resto, Laundry, Toko Rabbani, Catering, Bakery dan Sawah Padi. Pengelolaan setiap Usaha Produktif dilakukan oleh kepala Usaha Produktif yang diawasi oleh HBS. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan berada dibawah bendahara yayasan yang disebut koperasi (KOPONTREN).

Ustad Heri menyampaikan :

"ada 7 Usaha Produktif, dan untuk pengelolaan dibawah HBC, setahu saya belum ada kesepakatan untuk potongan laba usaha, masih tergantung prioritas setiap bulannya.

biasanya laba usaha digunakan untuk pengembangan pesantren"

Keterangan ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ustad Suwardi selaku Wakil Pimpinan, yang menegaskan bahwasanya terdapat 7 Usaha Produktif diatas tanah wakaf, masing-masing di manageri oleh kepala unit. Hasil usaha setiap bulannya disetorkan ke koperasi kecuali modal. Koperasi kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang mendesak, seperti pembangunan sarana prasarana. Berdasarkan pengelolaan keuangan kontribusi pendapatan Usaha Produktif dibandingkan sumber utama pendanaan pesantren (iuran santri) adalah sekitar 70:30. Hasil usaha tidak dialokasikan khusus untuk kegiatan pendidikan, melainkan lebih pada pemenuhan sarana prasarana umum pesantren.

Membandingkan triangulasi sumber diatas, keselarasan informasi ini memperkuat temuan bahwa, pengelolaan aset wakaf di MBS telah berjalan secara produktif, meskipun belum memiliki pola pembagian keuntungan tetap.

2) Pelaporan

Subindikator ini mengkaji sejauh mana lembaga wakaf membuat laporan dan menyampaikan laporan secara berkala dan transparan. Berdasarkan temuan lapangan, pelaporan atas kegiatan wakaf belum dilakukan secara rutin. Penyusunan laporan sebatas ketika dibutuhkan saja dan bersifat internal, belum terpublikasi kepada masyarakat umum.

Ustad Heri selaku pengelola aset wakaf, menyampaikan :

"belum ada laporan rutin untuk hasil pengelolaan aset wakaf dan belum ada situs resmi untuk menyampaikan

laporan tersebut. masih sebatas diketahui oleh staf karyawan yang bersangkutan"

Pernyataan ini dilengkapi oleh Ustad Suwardi, menjelaskan bahwasanya usaha produktif pelaporannya dilakukan setiap bulan dan diserahkan ke bendahara Koperasi. Namun dokumentasi laporan yang bersifat publik sejauh ini belum pernah dibuat. Laporan sebatas diketahui oleh pimpinan berwenang dan staff yang bertanggung jawab.

Ustadadz Heri menekankan ketiadaan laporan rutin dan media publikasi resmi. Ustad Suwardi menambahkan bahwa pelaporan internal usaha produktif dilakukan setiap bulan, namun informasi tidak disampaikan ke publik. Kesamaan dan kelengkapan data dari kedua narasumber ini memperkuat temuan bahwa pelaporan aset wakaf di MBS masih sebatas lingkup internal. sehingga aspek transparansi kepada masyarakat umum belum terpenuhi secara optimal.

d. Faktor Sistem

Dalam indikator sistem berkaitan dengan aspek-aspek pendukung dalam menjalankan proses Usaha Produktif wakaf.

1) Legalitas Tanah Wakaf

Indikator ini mengkaji terkait sejauh mana aset wakaf di MBS Yogyakarta telah memiliki sertifikat resmi dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh aset wakaf MBS pada prinsipnya telah bersertifikat dan tidak ada yang dalam sengketa.

Ustad Suwardi, Wakil Pimpinan IV menyampaikan :

"alhamdulillah, seluruh aset wakaf milik MBS telah bersertifikat resmi wakaf dan lancar dalam pengurusannya."

Penjelasan ini dilengkapi oleh keterangan Ustad Heri, menguatkan bahwa tidak ada aset wakaf yang sengketa. Ia menambahkan terdapat beberapa bidang tanah yang masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya karena proses pengalihan hak cukup sulit. Hal ini terjadi karena tanah tersebut merupakan warisan yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemiliknya (orang tua pewaris) sudah meninggal dunia. Meski demikian semua urusan perizinan dan persetujuan ahli waris telah dinyatakan selesai.

Triangulasi sumber dari keterangan Ustad Suwardi dan Ustad Heri menunjukkan konsistensi informasi dan memperkuat validitas temuan bahwa legalitas aset wakaf milik MBS pada umumnya telah terpenuhi, dengan kendala administratif minor yg tidak mempengaruhi status wakaf dan kegunaaanya.

2) Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah mengkaji keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur pengelolaan wakaf dan penerapan nilai-nilai syariat dalam aktivitasnya. Berdasarkan hasil temuan di MBS Yogyakarta, DPS khusus yang menangani pengelolaan wakaf tidak ada. Namun MBS memiliki BPP (Badan Penasihat Pesantren) yang bertugas memantau seluruh kegiatan pesantren termasuk pengelolaan aset wakaf. Penerapan nilai-nilai syariat, Usaha Produktif dijalankan dengan prinsip menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, maysir maupun praktik yang bertentangan dengan syariat islam.

Ustad Heri selaku pengurus wakaf menjelaskan :

"Untuk DPS khusus wakaf tidak ada, namun terdapat BPP yaitu Badan Penasihat Pesantren yang bertugas mengontrol seluruh kinerja semua bidang di MBS"

Keterangan ini dibenarkan oleh Ustad Suwardi Wakil Pimpinan IV, bahwa seluruh civitas termasuk pengelola unit wakaf, diawasi dan dimonitor oleh BPP. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi laporan dan identifikasi kendala yang diadapi dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan keterangan kedua narasumber diatas, DPS khusus wakaf tidak tersedia, fungsi pengawasan syariah tetap berjalan melalui mekanisme BPP yang memastikan seluruh kegiatan bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.

3) Manajemen Informasi Publik

Sub indikator ini mengukur keberadaan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi pengelolaan wakaf kepada publik, seperti media sosial, website maupun kanal komunikasi lainnya. Temuan dilapangan menunjukkan baik lembaga khusus wakaf maupun Hasbuna Business Center (HBC) belum memiliki akun media sosial maupun situs web khusus yang secara rutin mempublikasikan informasi pengelolaan aset wakaf. Media publikasi saat ini baru akun resmi MBS baik Instagram maupun website yang bersifat umum dan tidak khusus untuk pengelolaan wakaf atau Usaha Produktif HBC.

Ustad suwardi memberikan keterangan bahwa :

"tidak ada untuk akun media milik wakaf maupun HBC. Media sosial masih menjadi satu di Website MBS dan instagram MBS"

Pernyataan ini diperkuat oleh Ustad heri yang menambahkan keterangan bahwa pernah dilakukan inisiatif

pembuatan media sosial khusus wakaf namun saat ini tidak berlanjut (*mangkrak*). Selain itu, informasi hasil pengelolaan wakaf tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum, akses informasi memerlukan izin dari pihak berwenang.

Santri pengabdian menambahkan terkait media publik, bahwa sejauh pengamatannya tidak ada akun khusus HBC dan wakaf. Sesekali informasi terkait terlihat usaha produktif atau aset wakaf muncul di akun resmi MBS, namun frekuensinya tidak rutin setiap bulan. sebagian besar unggahan di media sosial MBS didominasi oleh informasi Penerimaan Santri Baru (PSB).

Pada faktor informasi publik melibatkan triangulasi sumber yakni Ustad Suwardi (Wakil Pimpinan), Ustad Heri (Pengelola Wakaf), dan Santri Pengabdian (Penerima Manfaat). ketiga narasumber memberikan informasi yang konsisten terkait ketiadaan media publikasi khusus HBS ataupun khusus wakaf. Konsistensi informasi ini menunjukkan validitas bahwa media publikasi pengelolaan wakaf di MBS masih bersifat umum dan belum optimal.

e. Faktor Hasil

Faktor hasil mengkaji sejauh mana aset wakaf dimanfaatkan secara produktif dan jangkauan manfaat. Dalam faktor ini menilai akan keberlanjutan usaha dan inklusivitas program. Terdapat 2 sub indikator sebagai berikut :

1) Rasio Wakaf Produktif

Subbab ini mengkaji persentase aset wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan total aset wakaf yang dimiliki. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh aset wakaf milik MBS 100% dimanfaatkan secara produktif, Pemanfaatan tersebut tidak

hanya sebatas pada penyediaan sarana pendidikan, seperti gedung pesantren dan fasilitas pendukung, tetapi juga pada pengembangan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, contohnya lahan sawah milik MBS dikelola dengan sistem kerjasama dengan petani, dimana hasil panennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi santri. Model ini mencerminkan prinsip keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf sekaligus pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar pesantren.

Ustad Suwardi selaku pimpinan menyampaikan :

"17 hektar aset wakaf milik pesantren semua dimanfaatkan mbak, selain yang ada didalam pesantren ini, persawahan ada di luar pesantren dikelola oleh petani"

Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Ustad Heri terkait manajemen berkelanjutan dalam pengelolaan aset wakaf, yaitu dengan diserahkan kepada ahlinya. MBS merekrut karyawan yang sesuai kompetensi dan menugaskan untuk mengelola aset wakaf sehingga Usaha Produktif berjalan secara optimal. Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan bahwa rasio wakaf produktif milik MBS mencapai 100%

2) Jangkauan Penerima Manfaat

Penerima manfaat mengukur jumlah pihak yang memperoleh manfaat langsung dari pemanfaatan aset wakaf yang dikelola MBS. Berdasarkan temuan di MBS menunjukkan penerima manfaat mencakup seluruh civitas pesantren termasuk santri, tenaga pendidik, serta karyawan. Saat ini jumlah santri mencapai +-2600 santri sedangkan jumlah tenaga kerja terdiri dari guru dan staf karyawan hampir +-160.

Ustad Suwardi menerangkan bahwa :

"untuk hitung-hitungan penerima manfaat yaa seluruh penghuti pesantren ini, ada sekitar 3000 santri dan 160 karyawan yang tergabung dari guru dan karyawan Usaha Produktif."

Keterangan ini diperkuat oleh Ustad Heri, bahwa manfaat wakaf tidak hanya dalam bentuk fasilitas pendidikan atau asrama untuk santri saja, tetapi keberadaan usaha produktif yang memberikan efek ganda (*multiplier effect*), yaitu mendukung kegiatan pendidikan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi internal pesantren. Keterangan Ustad Heri ini menunjukkan temuan yang selaras dengan keterangan Wakil Pimpinan yaitu Ustad Suwardi sehingga memperkuat validitas temuan bahwa pemanfaatan aset wakaf MBS bersifat inklusif dan menyentuh seluruh lapisan internal pesantren.

f. Faktor Dampak

Faktor dampak mengkaji dampak panjang dari adanya pengelolaan aset wakaf di lingkungan pesantren dan dampak terhadap masyarakat. Terdapat 2 sub indikator sebagai berikut :

1) Kemandirian

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan wakaf mampu menciptakan kemandirian finansial bagi lembaga maupun penerima manfaat. Berdasarkan temuan dilapangan keberadaan aset wakaf produktif di MBS memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian lembaga. setelah adanya usaha produktif berbasis wakaf, pesantren mengalami perkembangan pesat karena memiliki sumber pendanaan alternatif diluar iuran santri.

Ustad heri menyampaikan :

"sangat jauh berbeda sebelum berdirinya Usaha Produktif dan sebelum ada Usaha Produktif. bahkan 1 tahun terakhir pembangunan pesantren tidak mengambil dari uang iuran santri. Iuran santri digunakan untuk hal lain"

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ustad suwardi yang menegaskan bahwa keberadaan usaha produktif telah menjadi penopang utama dalam membantu perkembangan pembangunan. Namun demikian, beliau mengakui hasil usaha produktif belum sepenuhnya mampu menopang seluruh kebutuhan operasional. Beberapa kebutuhan santri seperti makan, laundry masih berasal dari iuran santri yang sifatnya kembali lagi untuk kepentingan santri.

Informasi tambahan disampaikan santri pengabdian yang menyatakan bahwa keberadaan usaha produktif wakaf memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari santri, sehingga tidak perlu jauh untuk mendapatkannya.

Trigulasi sumber menunjukkan konsistensi data dari ketiga narasumber yang menyatakan bahwa Usaha Produktif berperan besar mengurangi ketergantungan pada iuran santri dan memperkuat finansial pesantren, meski belum sepenuhnya mandiri secara total. Temuan ini mengindikasi bahwa pengelolaan wakaf di MBS memiliki arah yang positif dan berpotensi mencapai kemandirian ekonomi dimasa depan.

2) Infrastruktur

Indikator ini mengukur sejauh mana kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi di lingkungan pesantren. Berdasarkan temuan di Pesantren MBS, infrastruktur mengalami perkembangan pesat semenjak didirikannya Usaha Produktif berbasis wakaf. Bahkan

pembangunan berskala besar yang memerlukan anggaran besar dapat dibiayai dengan laba hasil usaha.

Ustad Suwardi menjelaskan :

"Awal tahun ini kita berproses membuat pagar pesantren dengan total 1,7 M, itu anggaran utama dari hasil usaha, yang hingga saat ini belum rampung pengerjaannya."

Keterangan ini ditambahkan oleh santri pengabdian yang menyatakan bahwa sejak adanya Usaha Produktif wakaf, ruang publik di pesantren semakin banyak dibangun seperti gazebo untuk kegiatan belajar, pembangunan taman-taman sebagai penyejuk serta tata ruang yang lebih rapi dan nyaman bagi civitas pesantren.

Pembangunan infrastruktur dapat dilihat secara langsung oleh peneliti ketika terjun ke lapangan dan keterangan kedua narasumber menunjukkan keselarasan informasi. Dengan demikian pengelolaan wakaf di MBS tidak hanya memperkuat kemandirian finansial tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan belajar

Berdasarkan hasil temuan pada masing-masing indikator IWN, dapat disimpulkan bahwa implementasi wakaf produktif di Pesantren MBS Yogyakarta telah menunjukkan kesesuaian dengan kerangka penilaian Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan aset wakaf yang dimiliki MBS telah dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pesantren, meski masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dan memerlukan perbaikan.

Temuan akan pemanfaatan sumber daya pesantren sejalan dengan penelitian Faiza et al. (2023) yang menegaskan bahwa pemanfaatan dana ZISWAF untuk mendirikan usaha produktif dapat menjadi sarana dalam mencapai kemandirian ekonomi. Pesantren MBS telah memanfaatkan sumber dayanya yang berupa aset wakaf yang luas untuk mendirikan beberapa Usaha Produktif yang strategis. Hal ini juga selaras dengan penelitian Faozan & Supratno (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan pesantren melalui dana wakaf memerlukan manajemen yang baik. pernyataan Faozan sesuai dengan temuan di MBS pada aspek pengelolaan yang mana dilakukan tertata dengan perencanaan yang matang dan manajemen Usaha Produktif yang terstruktur, sehingga dalam implementasinya Usaha Produktif telah berjalan sesuai rencana, tepat sasar dan maksimal.

Pada faktor kelembagaan, ditemukan perbedaan dengan penelitian Ardiyansyah & Kasdi (2021). Ardiansyah menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf memerlukan tiga faktor utama, yaitu manajemen terintegrasi, peran nazhir yang profesional dan transparansi dana. Temuan di MBS menunjukkan bahwa kelembagaan nazhir dan pengelolaan Usaha Produktif masih terpisah belum membentuk kesatuan manajemen yang terintegrasi. selain itu, transparansi dana dan pelaporan kepada publik juga belum terbuka sehingga belum terjadi partisipasi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di MBS telah memenuhi sebagian besar indikator optimal menurut BWI dan memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Namun untuk mencapai optimal secara penuh, diperlukan langkah strategis dalam beberapa indikator diantaranya dalam kualitas manajemen nazhir, status kenazhiran, pelaporan pengelolaan usaha produktif dan penerapan transparansi terhadap publik.

C. Wakaf Produktif terhadap Kemandirian Ekonomi Pesantren

Dalam konteks kemandirian ekonomi, pengembangan yang dilakukan Pesantren MBS memiliki prospek yang positif. Hal ini sejalan dengan temuan Masrur & Arwani (2022) yang melakukan studi kasus di Pesantren Walindo Pekalongan, yang mana Walindo berhasil mencapai kemandirian ekonomi melalui pendirian Usaha Produktif yang serupa dengan MBS. MBS menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pesantren tanpa ketergantungan penuh pada iuran santri, meskipun pendapatan dari usaha produktif belum sepenuhnya mampu menopang seluruh kebutuhan operasional.

Kemandirian ekonomi menurut Robert Havighurst adalah kemampuan individu atau lembaga untuk mengatasi permasalahan ekonominya secara mandiri, tanpa ketergantungan pada pihak luar, melalui optimalisasi tiga potensi utama pesantren, yaitu potensi santri, potensi sumber daya alam, dan potensi dana keuangan publik seperti zakat dan wakaf. Temuan penelitian di MBS Yogyakarta menunjukkan pendirian usaha produktif diatas aset wakaf memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan lembaga, khususnya dari segi pelayanan pembangunan. Berdasarkan data lapangan, seluruh aset wakaf MBS seluas 17 hektar dimanfaatkan secara produktif, baik dalam bentuk sarana asrama pesantren, gedung sekolah, halaman, bangunan Usaha Produktif maupun lahan pertanian.

Perkembangan infrastruktur menjadi salah satu indikator nyata peningkatan kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Pimpinan IV, Ustad Suwardi :

“ .....setelah didirikan Usaha Produktif, sangat berbeda mbak kondisinya. yang jelas uang itu berputar di dalam pesantren saja mbak, dari santri ke Usaha Produktif disetor ke bendahara dan begitu terus sehingga laba dari perputaran ekonomi ini menutup kebutuhan lain yang belum memiliki sumber dana”

Santri pengabdian menambahkan bahwa keberadaan usaha produktif berbasis wakaf memudahkan pemenuhan kebutuhan santri sehari-hari tanpa bergantung dengan pihak luar. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pesantren MBS berkontribusi signifikan terhadap kemandirian ekonomi pesantren dan menunjukkan potensi besar untuk mencapai kemandirian ekonomi secara penuh di masa depan. Untuk memberikan kejelasan yang lebih komprehensif mengenai hasil penelitian. Rangkuman temuan lapangan disajikan dalam bentuk matriks tabel sebagai berikut :

Indikator Indeks wakaf Nasional (IWN) 2022	Temuan Lapangan	Analisis
Regulasi	Peraturan dan kebijakan terkait wakaf difahami secara baik, namun belum pernah menerima bantuan secara langsung atas nama wakaf. Nadzir Mutawalli pernah mengikuti pelatihan pengelolaan wakaf dari BWI	Regulasi difahami secara baik, implementasi masih terbatas, nazir mengikuti pelatihan, belum ada dukungan nyata berupa fasilitas atau bantuan pemerintah secara langsung, menunjukkan bahwa faktor regulasi belum terlaksana secara keseluruhan
Kelembagaan	Manajemen dan ketugasan belum terkelola dengan baik. Pengelolaan dan administrasi dilaksanakan oleh lembaga berbeda. Status kenadziran diwakilkan oleh nadzir PCM Prambanan.	Kelembagaan belum terintegrasi dengan baik karena pemisahan fungsi antara pengelolaan dan administrasi. Posisi nadzir masih belum mandiri sehingga kelembagaan perlu diperkuat.

Indikator Indeks wakaf Nasional (IWN) 2022	Temuan Lapangan	Analisis
Proses	Pengelolaan aset wakaf diserahkan pada HBC (Hasbuna Business Center). Pelaporan dilakukan kepada pihak internal belum dipublikasikan secara terbuka	Proses pengelolaan sudah berjalan lancar melalui HBS, namun pada faktor transparansi masih kurang karena laporan tidak diakses untuk publik sehingga hal ini berpotensi menimbulkan keterbatasan akuntabilitas.
Sistem	Seluruh aset telah bersertifikat wakaf. Tidak memiliki DPS namun terdapat Badan Pengawas Pesantren. Belum tersedia media penyampaian informasi publik.	Legalitas aset sudah kuat, namun belum ada DPS dan media informasi publik sehingga pengawasan masih bersifat internal, belum terjadi keterbukaan informasi.
Hasil	100 % aset wakaf dimanfaatkan untuk usaha produktif. Penerima manfaat yaitu seluruh santri, guru dan karyawan MBS.	Penerima manfaat sudah optimal pada tingkat output. Distribusi manfaat juga sudah optimal merapa pada komunitas internal pesantren.
Dampak	Pemanfaatan wakaf produktif mengurangi ketergantungan dengan dana eksternal meskipun belum 100 %. Infrastruktur dapat berkembang dengan cepat setelah adanya usaha produktif berbasis wakaf.	Dampak nyata terlihat dalam kemandirian finansial dan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, kemandirian penuh belum tercapai, sehingga perlu diversifikasi usaha dan penguatan manajemen.

Tabel 4. 1 Matriks Kesimpulan Optimalisasi Wakaf Berdasarkan Indikator Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pesantren MBS Yogyakarta telah mengoptimalkan potensi wakaf yang dimiliki melalui pemanfaatan aset serta pembentukan manajemen khusus yang bertugas mengelola usaha produktif. Kehadiran usaha produktif berbasis wakaf menjadi sumber pendanaan alternatif yang secara bertahap mampu memenuhi sebagian kebutuhan pesantren seperti pembagunan sarana prasarana, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada iuran santri.
2. Berdasarkan evaluasi menggunakan Indikator Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang dikembangkan Badan Wakaf Nasional (BWI), pengelolaan wakaf di pesantren MBS telah memenuhi sebagian besar aspek penilaian, meliputi faktor regulasi, proses, sistem, hasil dan dampak. Namun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, terutama pada faktor kelembagaan yang berkaitan dengan integrasi kepengurusan nazhir dan pengelola usaha produktif, serta pada aspek transparansi informasi publik. Selain itu, faktor sistem juga perlu penguatan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar pelaksanaan wakaf berjalan sesuai ketentuan syariah dan prinsip tata kelola.
3. Pemanfaatan aset wakaf sebagai wakaf produktif terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan berkembang pesat seiring didirikannya usaha produktif. Meski tingkat kemandirian finansial belum sepenuhnya tercapai, perkembangan ini menunjukkan bahwa pesantren semakin mandiri secara ekonomi dan berpotensi untuk mencapai kemandirian penuh dimasa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk Pesantren
    a) Berdasarkan faktor kelembagaan yang ditemukan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait hubungan antara manajemen nazhir wakaf dengan pengelola Usaha Produktif (HBC). Saat ini keduanya belum terintegrasi secara kelembagaan sehingga kepemilikan aset dan laporan keuangan belum menjadi satu dalam sistem dan satu manajemen yang utuh.
    b) Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari sistem tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berperan memberikan fatwa, arahan dan pengawasan syariah terhadap keputusan strategis pengelolaan wakaf, sehingga keberadaan DPS dapat memperkuat legitimasi lembaga sebagai pengelola wakaf produktif yang profesional dan transparan.
    c) Perlu pembuatan media informasi khusus yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi ke publik mengenai pengelolaan amal usaha milik HBC. Keberadaan media publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas pengelolaan.
    d) Perlu disusun laporan keuangan dan kinerja secara terpisah untuk usaha produktif yang berdiri diatas tanah wakaf, serta dilakukan pelaporan rutin kepada Badan Pengawas Pesantren (BPP) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini penting untuk dilakukan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup kajian dengan menintegrasikan pembahasan mengenai manajemen wakaf dan manajemen HBC secara komprehensif sehingga informasi yang diperoleh akan lebih mendalam terutama terkait model tata kelola dalam pengembangan Usaha Produktif berbasis wakaf di pesantren MBS.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, F., Hukum, P., Syariah, E., Tingga, S., & Nurul, A. I. (2022). Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Syariah*, *4*(1).

Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *8*(1), 61. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871

Bayu Sudrajat, & Ainul Imronah. (2023). Productive Waqf: Concepts and Its Impact on Improving Community Economy. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, *1*, 127–140. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.784

Faiza, N. A. R., Syarifudin, S., & Nurafini, F. (2023). Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) dan Bisnis Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 154–165.

Faozan, A., & Supratno, H. (2022). Membangun Ketahanan dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, *3*(2), 31–50. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.31-50

Fathul Qorib. (n.d.).

Fauzul, A., Hasibuan, H., Nur, M. M., Syariah, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Penulis, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(2).

Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(1), 28–39. https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339

Gufronul, A. (2020). Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Membangun. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *1*, 30–46.

Hadi, A., & Rusman, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Pena Persada.

Halim, A. (2005). *Manajemen Pesantren*. Pustaka Pesantren.

Indeks Wakaf Nasional 2022. (2022). https://www.bwi.go.id/storage/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf

Kamalia, & Erly Rizky. (n.d.). *Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf*.

Kamilatul Hasanah, D. (2023). Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal. *Jurnal Ilmiah Keislaman*.

Majid, A., Noviarita, H., & Anggraeni, E. (2023). Peran Digitalitasi Ekonomi Untuk Membentuk Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(4), 1265–1273. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3441

Manan, D. (2016). *WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB*. *1*(2).

Masrur, M., & Arwani, A. (2022). Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 2755–2764.

Mulia Rahman, R., & Tanjung, H. (2022). *Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan*. *3*(5).

Nasrullah, N., Budiyanto, G., Samidjo, G. S., Ihsan, F. M., A'zham, K. S., Marwani, I., & Martini, M. (2023). Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Agribisnis di Lingkungan Pondok Pesantren Raudhatus Salaam Berbah – Sleman. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *8*(1), 120–129. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i1.4108

Ni'mati Rahmatika, A., Rini, S., Abdul, U. K., & Hasbulah, W. (2021). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Pesantren (Productive Waqf Management in Developing The Economy Of The Community Around The Pesantren). *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, *5*(1).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

Sukiro, S. (1997). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press.

Sultan Antus NAsrudin Muhammad, & May Mualimah. (2023). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin). *Al-Mizan*, 109–122.

Wijaya, M. W., & Sukmana, R. (2020). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(5), 1072. https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1072-1085

Winardi, Praysi Nataly Rattu, Novie R. Pioh, & Stefanus Sampe. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Governance*, *2*.

LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI WAWANCARA



Lampiran 1. 1 Wawancara dengan Pengelola Wakaf Harian



Lampiran 1. 2 Wawancara dengan Pimpinan IV



Lampiran 1. 3 Wawancara dengan Santri Pengabdian ARF Putra



Lampiran 1. 4 Wawancara dengan Santri Pengabdian ARF Putri

B. HASIL WAWANCARA

1. Pengelola Wakaf Harian

Tanggal dan Waktu Wawancara : 26 Juli 2025
Tempat : Kantor Staf Wakaf
Identitas Informan
Nama : Ustad Heri
Jabatan : Kepala Divisi Wakaf dan Pembangunan

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Regulasi	Dukungan Regulasi	1. Bagaimana pemahaman anda terkait peraturan atau undang-undang yang mengatur wakaf produktif? 2. Sejauh mana regulasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan wakaf di pesantren? 3. Dapatkah anda menceritakan pengalaman pesantren dalam menerima sosialisasi dari BWI atau Kemenag terkait peraturan kebijakan wakaf?	Tahu akan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, dan beberapa kali mendapatkan pengarahan terkait peraturan tersebut. awalnya mau berjalan profesional mbak, tapi ketika dilapangan belum bisa jalan seperti apa yang di peraturan mbak. Pernah, beberapa kali BPN itu mengadakan seminar terkait regulasi wakaf, nah namun untuk pelaksanaannya kadang terbentur akan peraturan yang dibikin mbak, seperti harus menggunakan TTD, lha padahal yang diatasnamakan wakaf itu orangnya sudah meninggal. Jadi belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya karena kesandung itu. Kalau untuk Kemenag atau BWI malah belum pernah. Yang sering itu dari Ormas (Muhammadiyah)

	Dukungan Anggaran	1. Apakah pesantren pernah menerima dukungan dana dari pemerintah? 2. Dapatkah anda menjelaskan pengalaman pesantren dalam memperoleh dukungan dana dari pemerintah terkait pengembangan wakaf?	Belum pernah mbak, kalau untuk atas nama lembaga wakaf belum ada. Kalau dari BI, Ketenagakerjaan, itu ada. Kemudian dana ini kita dirikan di aset wakaf milik MBS
	Dukungan Pelatihan	1. Apakah pemerintah pernah menyelenggarakan pelatihan manajemen wakaf untuk pesantren? 2. Sejauh mana dampak pelatihan yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di pesantren ini?	Belum pernah mbak, yang banyak terjun malah PCM Muhammadiyahnya.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Kelembagaan	Kualitas Manajemen nazhir	1. Bagaimana pesantren melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan aset wakaf? 2. Adakah upaya untuk melakukan sertifikasi mutu atau audit secara manajerial terkait pengelolaan wakaf?	Belum ada mbak, masih sejalannya. Belum ada evaluasi berkala dan palingan kita lapor ke PCM per berapa bulan sekali. Karena yang aslinya nazhir kan di PCM Prambanan mbak, kita disini sebagai wakil tangan saja.
	Status nazhir	1. Bagaimana pesantren melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan aset wakaf? 2. Adakah upaya untuk melakukan sertifikasi mutu atau audit secara manajerial terkait pengelolaan wakaf?	Belum ada mbak, masih sejalannya. Belum ada evaluasi berkala dan palingan kita lapor ke PCM per berapa bulan sekali. Karena yang aslinya nazhir kan di PCM Prambanan mbak, kita disini sebagai wakil tangan saja.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Proses	Pengelolaan	1. Apa saja Usaha Produktif yang dikelola dari aset wakaf? 2. Bagaimana proses pengelolaannya secara teknis, mulai dari perencanaan hingga pelaporan? 3. Seberapa besar kontribusi aset wakaf terhadap pemasukan pesantren? 4. Bagaimana hasil dari Usaha Produktif wakaf dalam mendukung kegiatan pendidikan dan operasional lainnya?	Ada 7 mbak; Hasbuna Mart, Hasbuna Resto, Laundry, Rabbani, Catering, Pertanian Padi, Bakery. kalo pengelolaan diserahkan ke kepala unit mbak. Kita tidak membawahi mereka. Yang mengawasi dan mengelola langsung dari bendahara yayasan. Setau saya setiap bulan tiap Usaha Produktif menyetorkan seluruh labanya, kecuali modal ke bendahara yayasan. Nanti setelah perhitungan dikembalikan lagi ke Usaha Produktif. Belum ada kesepakatan untuk labanya sih mbak, masih tergantung prioritas waktu saja. Jika sedang butuh banyak dana yaa bendahara ambil banyak dari Usaha Produktif, kalo lagi biasa yaa labanya digunakan untuk pengembangan usaha. Kalau hasil dari Usaha Produktif sejauh ini masih untuk pembangunan mbak, karena masih bangun terus. Jadi operasional dan dana pendidikan ya masih mengandalkan uang SPP santri.

	Pelaporan	1. Bagaimana praktik pelaporan kegiatan dan keuangan dari pengelolaan wakaf di pesantren ini? 2. Seberapa sering laporan dibuat, dan siapa saja pihak yang menerimanya? 3. Apakah laporan tersebut terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan? (seperti masyarakat dan donatur)	Belum ada laporan rutin mbak wkwk, tergantung pimpinan minta apa engga. Aslinya kita ada laporannya tapi tidak diserahakan rutin ke sana. Lebih rutin berkabar ke PCM yang diatas tadi sih mbak. Belum di upload ke website mbak wkwk, dulu pernah mulai bikin website khusus wakaf tapi mangkrak dan belum jalan lagi. Sejauh ini laporannya masih untuk internal saja.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Sistem	Legalitas Tanah Wakaf	1. Apakah seluruh aset wakaf yang digunakan pesantren telah memiliki legalitas resmi? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengurus legalitas aset wakaf? 3. Apakah ada pendampingan dari BWI atau pemerintah dalam mengurus legalitas aset wakaf?	Alhamdulillah sudah atas nama wakaf semua mbak, tidak ada yang sengketa dll. palingan masih atasnama pemilik (SHM) karena masih proses. Kendalanya cuman dikelengkapan berkas mbak, tidak yang kendala regulasi. Tidak ada kalo dari kemenag dan BWI. Kalo dari BPN dan PCM Muhammadiyah ya rutin karena mereka yang mengurus tanah2 ini.
	Kepatuhan Syariah	1. Bagaimana mekanisme pengawasan syariah terhadap pengelolaan wakaf dipesantren ini? 2. Apakah pesantren memiliki Dewan	Adanya BPP (Badan Pembina Pesantren) yang paling dimintai laporan pembelian tanah atau aset wakaf yang sudah cair.

		Pengawas Syariah atau bentuk pengawasan lain terhadap pengelolaan wakaf? 3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi wakaf yang dilakukan?	
	Manajemen Informasi Publik	1. Apakah pesantren/lembaga wakaf memiliki saluran informasi resmi? 2. Bagaimana praktik pesantren dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan laporan kegiatan wakaf kepada publik dan donatur? 3. Apakah laporan kegiatan wakaf dipublikasi secara rutin dan terbuka untuk publik? 4. Seberapa besar peran transparansi informasi dalam mengembangkan wakaf?	Belum punya mbak. Mau punya website itu tapi belum jadi Laporannya ke BPP aja mbak. Kalo udah selesai proses pemwakafan yaa sudah tidak ada pelaporan kesana, karena aslinya kita itu jual beli mbak.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Hasil	Rasio Wakaf Produktif	1. Berapa banyak Usaha Produktif pesantren yang dikelola diatas aset wakaf? 2. Bagaimana manajemen Usaha Produktif yang dijalankan agar tetap produktif dan berkelanjutan?	
	Jangkauan Penerima Manfaat	1. Berapa jumlah penerima manfaat dari adanya aset wakaf	Kalau untuk penerima manfaat kita tidak ada yang spesifik mbak,

		produktif? siapa sajakah itu? 2. Apakah pengelolaan aset wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak termasuk santri? 3. Dalam pandangan anda, apakah wakaf produktif saat ini sudah dirasakan semua pihak?	karena memang dibangun ya untuk pondok, siapa yang ada di pesantren menikmati (santri, guru, Ustad).

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Dampak	Kemandirian	1. Sejauh mana kontribusi unit wakaf terhadap pemasukan rutin pesantren? 2. Apakah hasil wakaf mampu mendukung pembiayaan operasional secara mandiri? 3. Menurut anda, apakah pesantren terlihat lebih mandiri secara ekonomi setelah ada pengembangan wakaf? 4. Setelah adanya pengembangan wakaf apakah terjadi penurunan ketergantungan terhadap dana eksternal setelah pengembangan aset wakaf?	Kalau rutin ya rutin mbak, tapi besaranya tidak stabil perbulannya. Dan hasil Usaha Produktif mendukung pembagunan. Kalo untuk SPP ya tetap harus mbak, karena memang itu sumber pemasukan utama. Jadi tetap bergantung kesitu mbak. Kalau bergantung ke utang pihak lain sudah tidak. Yaa, setelah adanya Usaha Produktif lumayan membuat pesantren lebih mandiri
	Infrastruktur Wakaf	1. Bagaimana hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pembangunan atau pengembangan fasilitas pesantren? 2. Apakah fasilitas pesantren seperti asrama, perlengkapan belajar tersada lebih	Yaa, sejauh ini larinya uang ke pembagunan mbak. Untuk pemabgunan asrama santri ada memang kontribusi uang wakaf, tapi dana besar ya masih dari SPP dan uang gedung.

		baik karena adanya unit wakaf? 3. Bagaimana proses pengambilan keputusan pesantren dalam memprioritaskan penggunaan hasil usaha wakaf?	

2. Pimpinan Pesantren

Tanggal dan Waktu Wawancara : Kamis, 7 Agustus 2025
Tempat : Kantor Wakaf dan Pengembangan
Identitas Informan
Nama : Ustadadz Suwardi
Jabatan : Wakil Pimpinan IV

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Regulasi	Dukungan Regulasi	1. Bagaimana pemahaman anda terkait peraturan atau undang-undang yang mengatur wakaf produktif? 2. Sejauh mana regulasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan wakaf di pesantren? 3. Dapatkah anda menceritakan pengalaman pesantren dalam menerima sosialisasi dari BWI atau Kemenag terkait peraturan kebijakan wakaf?	Tahu akan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang terkait wakaf dan pengelolannya. dan ini menjadi dasar pengambilan keputusan di MBS mba, tanah pondok seluas 17 hektar ini semua atas nama wakaf. pernah saya sebagai perwakilan pesantren dan wakil dari PCM Prambanan menghadiri sosialisasi BWI, sertifikatnya masih ada ini, saya simpan.
	Dukungan Anggaran	1. Apakah pesantren pernah menerima dukungan dana dari pemerintah? 2. Dapatkah anda menjelaskan pengalaman pesantren dalam memperoleh dukungan dana dari pemerintah terkait pengembangan wakaf?	Kalau untuk wakaf tidak ada, karena memang bantuan pemerintah itu sifatnya membuat proposal ya mbak, jadi kita tidak pernah mengajukan bantuan untuk pengembangan wakaf. dari awal tanah pondok ini diwakafkan ya untuk kemajuan pendidikan, jadi seringnya pengajuan proposalnya terkait pembuatan kelas atau

			yang baru-baru ini mau bikin lab kimia.
	Dukungan Pelatihan	1. Apakah pemerintah pernah menyelenggarakan pelatihan manajemen wakaf untuk pesantren? 2. Sejauh mana dampak pelatihan yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di pesantren ini?	Pernah, yang saya jelaskan tadi diawal. diadakan di bogor waktu itu. kalau untuk dampaknya tidak yang banyak diterapkan di pesantren, karena yaa gimana, pesantren sudah ada rencana besar dan panduan tersendiri dalam sekian tahun, jadi sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai pengetahuan saja bagi saya pribadi dan untuk teman-teman pengelola disini.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Kelembagaan	Kualitas Manajemen nazhir	1. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan wakaf dipesantren ini? 2. Adakah upaya untuk melakukan sertifikasi mutu atau audit secara manajerial terkait pengelolaan wakaf?	Untuk bidang pengelolaan wakaf kami tidak yang membuat lembaga tersendiri mbak,memang dari awal dulu namanya *Wakaf Center*, tujuannya ya untuk mengurus semua aset wakaf yang di MBS ini, namun beberapa tahun belakang *Wakaf Center* sudah digantikan oleh hasbuna bisnis center (HBC) jadi untuk pengurusan wakaf sebatas mengurus legalitas tanah saja tidak sampai pengelolaan. jadi untuk pertanyaan kedua

			jawabannya tidak ada audit mbak wkwk
	Status Nadzir	1. Bagaimana struktur kelembagaan wakaf dipesantren ini?Apakah nazhir memiliki status kelembagaan? Bagaimana sistemnya	tidak memiliki struktur dan status nadzir adalah pembantu nadzir PCM

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Proses	Pengelolaan	1. Apa saja Usaha Produktif yang dikelola dari aset wakaf? 2. Bagaimana proses pengelolaannya secara teknis, mulai dari perencanaan hingga pelaporan? 3. Seberapa besar kontribusi aset wakaf terhadap pemasukan pesantren? 4. Bagaimana hasil dari Usaha Produktif wakaf dalam mendukung kegiatan pendidikan dan operasional lainnya?	Ada 7 Usaha Produktif, pengelolaan secara teknis diserahkan ke HBC mulai dari rencana pembangunan hingga laporan keuangan. kalau untuk kontribusi terhadap pemasukan pesantren 70:30 dengan dana utama yaitu uang santri. kalau untuk dalam mendukung pendidikan secara khusus kami tidak bisa mengatakan khusus ya mbak. karena dari awal berdiri Usaha Produktif paling banyak larinya uang ya ke pembangunan, seperti yang baru ini membangun pagar kita alokasikan 1,2 M
	Pelaporan	1. Bagaimana praktik pelaporan kegiatan dan keuangan dari pengelolaan wakaf di pesantren ini? 2. Seberapa sering laporan dibuat, dan siapa saja pihak yang menerimanya? 3. Apakah laporan tersebut	pelaporan setiap bulan, semua uang yg dimiliki Usaha Produktif (kecuali modal) disetorkan ke bendahara yayasan, disini namanya koperasi, kemudian setelah dilakukan penghitungan dan kebutuhan pesantren, sisanya dikembalikan

		terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan? (seperti masyarakat dan donatur)	lagi ke Usaha Produktif. belum, untuk dokumentasi laporan belum dibuat untuk umum. masih sebatas diketahui oleh pimpinan dan staff yang bertanggung jawab

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Sistem	Legalitas Tanah Wakaf	1. Apakah seluruh aset wakaf yang digunakan pesantren telah memiliki legalitas resmi? 2. Apakah ada pendampingan dari BWI atau pemerintah dalam mengurus legalitas aset wakaf?	Sudah, alhamdulillah. tidak ada pendampingan karena tidak ada masalah serius yang perlu diberikan pendampingan. masalah yang ada itu masih tergolong ingan mbak, seperti tanah warisan yang belum SHM dll
	Kepatuhan Syariah	1. Bagaimana mekanisme pengawasan syariah terhadap pengelolaan wakaf dipesantren ini? 2. Apakah pesantren memiliki Dewan Pengawas Syariah atau bentuk pengawasan lain terhadap pengelolaan wakaf? 3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi wakaf yang dilakukan?	di MBS terdapat dewan pengawas yang mengawasi semua kegiatan mbak, jadi yang mengawasi jalannya Usaha Produktif yang dewan tersebut. dalam penerapan prinsip masih yang sekedar tidak terjadi riba dan maysir dalam setiap unit bisnis yang dikelola.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Hasil	Manajemen Informasi Publik	Apakah pesantren/lembaga wakaf memiliki saluran informasi resmi?	tidak memiliki akun khusus, baru ada satu yang umum itu mbak, milik bersama wkwk
	Rasio Wakaf Produktif	Berapa banyak Usaha Produktif pesantren yang dikelola diatas aset wakaf?	7 Usaha Produktif

	Jangkauan Manfaat	1. Apakah pengelolaan aset wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak termasuk santri? 2. Dalam pandangan anda, apakah wakaf produktif saat ini sudah dirasakan semua pihak?	dapat dirasakan, kalau melihat kilas balik dulu sebelum memiliki usaha yaa jauh sekali mbak. sekarang apapun kebutuhan santri dapat dicukupi lewat Usaha Produktif yang didirikan diatas tanah wakaf. sudah dapat dirasakan, bahkan Usaha Produktif ini beberapa dibuka untuk umum, seperti toko rabbani dan hasbuna mart itu warga boleh beli disitu.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Dampak	Kemandirian	1. Sejauh mana kontribusi unit wakaf terhadap pemasukan rutin pesantren? 2. Apakah hasil wakaf mampu mendukung pembiayaan operasional secara mandiri? 3. Menurut anda, apakah pesantren terlihat lebih mandiri secara ekonomi setelah ada pengembangan wakaf? Setelah adanya pengembangan wakaf apakah terjadi penurunan ketergantungan terhadap dana eksternal setelah pengembangan aset wakaf?	70:30 tadi mbak, untuk operasional belum, lebih banyak untuk pengembangan, kalau untuk gaji karyawan, makan santri itu masih menggunakan dana utama, iuran wali santri. sangat mbak, setelah didirikannya Usaha Produktif atas wakaf yaa jelas uang berputar dipesantren saja, yang tadinya kita mengandalkan pihak lain sekarang sedikit demi sedikit sudah tidak. kalau untuk penurunan dana eksternal belum mbak, masih sangat mengandalkan dana iuran wali, karena 17 tahun MBS berdiri masih terus mbangun mbangun dan mbangun wkwk, jadi

			dana itu masih sangat dibutuhkan
	Infrastruktur Wakaf	1. Bagaimana hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pembangunan atau pengembangan fasilitas pesantren? 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan pesantren dalam memprioritaskan penggunaan hasil usaha wakaf?	Yaaa, kalau ini setuju, uang hasil pendirian Usaha Produktif digunakan untuk pembangunan dan pengembangan. prioritas saat ini yaa masih di pembangunan mbak, jadi njen bisa lihat sendiri dimana mana masih berantakan dan tiap hari memang mendatangkan tukang untuk bebenah.

3. Santri

Tanggal dan Waktu Wawancara : Kamis 7 Agustus 2025
Tempat : Kantor Humas MBS
Identitas Informan
Nama : Langlang Muhammad Bashori
Vania Nabila Izzati
Jabatan : Santri pengabdian ARF

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Proses	Pengelolaan	Apa saja Usaha Produktif yang dikelola dari aset wakaf?	kurang tahu mbak untuk yang diatas wakaf hehe, setau aya disini ada 11 (ketambahan MBG, Kantin, Koperasi pondok putra)
	Pelaporan	Apakah laporan tersebut terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan? (seperti masyarakat dan donatur)	sejauh ini saya belum lihat mbak untuk informasi seputar wakaf, lebih banyak informasi PSB yang di posting

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Sistem	Manajemen Informasi Publik	1. Apakah pesantren/lembaga wakaf memiliki saluran informasi resmi? 2. Apakah laporan kegiatan wakaf dipublikasi secara rutin dan terbuka untuk publik?	tidak memiliki, dan tidak terpublikasi
	Manajemen Informasi Publik	1. Apakah pesantren/lembaga wakaf memiliki saluran informasi resmi? 2. Apakah laporan kegiatan wakaf dipublikasi secara rutin dan terbuka untuk publik?	tidak memiliki, dan tidak terpublikasi

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Hasil	Rasio Wakaf Produktif	Berapa banyak Usaha Produktif pesantren yang dikelola diatas aset wakaf?	11 Usaha Produktif yang saya ketahui didalam pesantren ini
	Jangkauan Penerima Manfaat	1. Apakah pengelolaan aset wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak termasuk santri? 2. Dalam pandangan anda, apakah wakaf produktif saat ini sudah dirasakan semua pihak?	Ya, sangat terasa pembangunannya dan kami senang dengan adanya Usaha Produktif, tidak perlu pergi keluar pesantren untuk mencari kebutuhan.

Faktor	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Faktor Dampak	Kemandirian	Menurut anda, apakah pesantren terlihat lebih mandiri secara ekonomi setelah ada pengembangan wakaf?	betul, sejauh saya ikut disini pesantren terus bangun mbak, tidak tahu kalau ternyata pembangunan berasal dari keuntungan Usaha Produktif. sangat bagus untuk perkembangannya bak
	Infrastruktur Wakaf	Apakah fasilitas pesantren seperti asrama, perlengkapan belajar tersada lebih baik karena adanya unit wakaf?	iya, gedung pendidikan dan fasilitas pendukungnya seperti ruang publik terbuka itu sangat berguna sekali bagi kami santri untuk sekedar beristirahat atau untuk belajar. pengadaan kekurangan itu cepat terlayani.

C. PEDOMAN WAWANCARA

No	Faktor	Indikator	Pertanyaan	Informan		
				I	II	II
1	Faktor Regulasi	Dukungan Regulasi	1. Bagaimana pemahaman anda terkait peraturan atau undang-undang yang mengatur wakaf produktif? 2. Sejauh mana regulasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan wakaf di pesantren? 3. Dapatkah anda menceritakan pengalaman pesantren dalam menerima sosialisasi dari BWI atau Kemenag terkait peraturan kebijakan wakaf?	v v v	v v v	
		Dukungan Anggaran	1. Apakah pesantren pernah menerima dukungan dana dari pemerintah? 2. Dapatkah anda menjelaskan pengalaman pesantren dalam memperoleh dukungan dana dari pemerintah terkait pengembangan wakaf?	v v	v v	
		Dukungan Pelatihan	1. Apakah pemerintah pernah menyelenggarakan pelatihan manajemen wakaf untuk pesantren? 2. Sejauh mana dampak pelatihan yang diberikan	v	v	

			pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di pesantren ini?	v	v	
2	Faktor Kelembagaan	Kualitas Manajemen nazhir	1. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan wakaf di pesantren ini? apakah terdapat struktur yang jelas? 2. Bagaimana pesantren melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan aset wakaf? 3. Adakah upaya untuk melakukan sertifikasi mutu atau audit secara manajerial terkait pengelolaan wakaf?	v v v	v v	
		Status nazhir	1. Bagaimana struktur kelembagaan wakaf dipesantren ini? 2. Apakah nazhir memiliki status kelembagaan? Bagaimana sistemnya? 3. Bagaimana pembagian tugas yang jelas antara para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf?	v v	v v	
3	Faktor Proses	Pengelolaan	1. Apa saja Usaha Produktif yang dikelola dari aset wakaf? 2. Bagaimana proses pengelolaannya secara teknis, mulai dari perencanaan hingga pelaporan? 3. Seberapa besar kontribusi aset wakaf	v v	v v	v

			terhadap pemasukan pesantren? 4. Bagaimana hasil dari Usaha Produktif wakaf dalam mendukung kegiatan pendidikan dan operasional lainnya?	v v	v v	
		Pelaporan	1. Bagaimana praktik pelaporan kegiatan dan keuangan dari pengelolaan wakaf di pesantren ini? 2. Seberapa sering laporan dibuat, dan siapa saja pihak yang menerimanya? 3. Apakah laporan tersebut terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan? (seperti masyarakat dan donatur)	v v v	v v v	V
4	Faktor Sistem	Legalitas Tanah Wakaf	1. Apakah seluruh aset wakaf yang digunakan pesantren telah memiliki legalitas resmi? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengurus legalitas aset wakaf? 3. Apakah ada pendampingan dari BWI atau pemerintah dalam mengurus legalitas aset wakaf?	v v	v v v	
		Kepatuhan Syariah	1. Bagaimana mekanisme pengawasan syariah terhadap pengelolaan wakaf dipesantren ini?	v	v	

			2. Apakah pesantren memiliki Dewan Pengawas Syariah atau bentuk pengawasan lain terhadap pengelolaan wakaf? 3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi wakaf yang dilakukan?	v v	v v	
		Manajemen Informasi Publik	1. Apakah pesantren/lembaga wakaf memiliki saluran informasi resmi? 2. Bagaimana praktik pesantren dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan laporan kegiatan wakaf kepada publik dan donatur? 3. Apakah laporan kegiatan wakaf dipublikasi secara rutin dan terbuka untuk publik? 4. Seberapa besar peran transparansi informasi dalam mengembangkan wakaf?	v	v v v v	v v
5	Faktor Hasil	Rasio Wakaf Produktif	1. Berapa banyak Usaha Produktif pesantren yang dikelola diatas aset wakaf? 2. Bagaimana manajemen Usaha Produktif yang dijalankan agar tetap produktif dan berkelanjutan?	v	v v	v

		Jangkauan Penerima Manfaat	1. Berapa jumlah penerima manfaat dari adanya aset wakaf produktif? siapa sajakah itu? 2. Apakah pengelolaan aset wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak termasuk santri? 3. Dalam pandangan anda, apakah wakaf produktif saat ini sudah dirasakan semua pihak?	v v v	v v v	 v v
6	Faktor Dampak	Kemandirian	1. Sejauh mana kontribusi unit wakaf terhadap pemasukan rutin pesantren? 2. Apakah hasil wakaf mampu mendukung pembiayaan operasional secara mandiri? 3. Menurut anda, apakah pesantren terlihat lebih mandiri secara ekonomi setelah ada pengembangan wakaf? 4. Setelah adanya pengembangan wakaf apakah terjadi penurunan ketergantungan terhadap dana eksternal setelah pengembangan aset wakaf?	v v v	v v v	 v
		Infrastruktur Wakaf	1. Bagaimana hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pembangunan atau pengembangan fasilitas pesantren?	v	v	

			2. Apakah fasilitas pesantren seperti asrama, perlengkapan belajar tersada lebih baik karena adanya unit wakaf? 3. Bagaimana proses pengambilan keputusan pesantren dalam memprioritaskan penggunaan hasil usaha wakaf?	v	v	v

Keterangan :
Informan I : Pimpinan Pesantren
Informan II : Pengurus Yayasan/nazhir Pelaksana
Informan III : Santri

RIWAYAT HIDUP

Hani'ah Mahmudah, yang biasa disapa Hani, lahir di Kulon Progo pada 19 Juni 1999. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di SD N Janten dan MTs Negeri 2 Kulon Progo pada tahun 2013–2015. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah dan mondok di Pesantren Amtsilati Jepara sejak 2015 hingga 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Hani'ah melanjutkan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII). Selama masa kuliah, ia menekuni bidang keuangan publik Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi pesantren.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini. Penulis dapat dihubungi melalui email: **mahmudahhaniah@gmail.com** atau melalui media sosial:
Instagram: @haniahmahmudahh